

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN E-PARTISIPASI
DI NEGARA AFRIKA**



SKRIPSI

Oleh :

Nama: Ghina Fairuz Rahardhian

No. Mahasiswa: 21312248

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN E-PARTISIPASI
DI NEGARA AFRIKA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, UII

Oleh :

Nama: Ghina Fairuz Rahardhian

No. Mahasiswa:21312248

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Penulis,



(Ghina Fairuz Rahardhian)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN E-PARTISIPASI DI
NEGARA AFRIKA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Ghina Fairuz Rahardhian

No. Mahasiswa: 21312248

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Pada
Tanggal 19 Mei 2025.....
Dosen Pembimbing,



(Arief Rahman S.E., M.COM., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi Di Negara Afrika

Disusun oleh : GHINA FAIRUZ RAHARDHIAN

Nomor Mahasiswa : 21312248

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 10 Juni 2025**

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Penguji : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

MOTTO

"Wa may yataqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzug-hu min haisu la yahtasib,

Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha baligu amrih,

Qad ja'alallahu likulli syai'ing qadra"

Alhamdulillah Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wata'ala, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kekuatan atas segala Kelemahan umatnya. Atas Rahmat Yang Maha Kuasa Karya Iimiah ini dapat terselesaikan dengan baik dan berjalan lancar.

Karya ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku

Bapak Suhardi dan Ibu Irna Indarwati

“Allah SWT tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS.Al-in syirah 5-6)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi penulis yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi Di Negara Afrika” Dapat terselesaikan dengan baik. Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari doa dan bantuan orang lain. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat, kemudahan, kekuatan dan pertolongan dalam setiap langkah hidup penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS., yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Arief Rahman S.E., M.Com., Ph.D., yang berperan sebagai Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, arahan, kesempatan dan dukungan yang luar biasa untuk membantu penulis dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Suhardi dan Ibu Irna Indarwati tersayang. Terima kasih atas segala perjuangan dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, kasih sayang yang diberikan dan doa yang tidak pernah putus untuk penulis sehingga menjadi motivasi dan semangat untuk penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudara penulis, Avia Zalfa Rahardhian dan Shabrina Asyifa Rahardhian terima kasih selalu ada disaat suka dan duka yang penulis alami selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang memberikan semangat, dukungan, dari pertama kuliah sampai menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Gema Bagus Hanggorokasih, terima kasih selalu ada dalam suka maupun duka untuk memberikan dukungan, perhatian, tenaga dan waktu dalam segala kondisi dan mendampingi penulis dalam segala hal menemani atau menghibur di dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan memberi semangat untuk pantang menyerah.
7. Terima kasih kepada teman-teman penulis yang telah berjuang bersama dari semester satu: Nadifa, Freya, Lestin, Khansa, Natasya, Afifah, Zahra, Firda dan Lisa. Dukungan dan semangat kalian dalam menyelesaikan tugas akhir ini sangat berarti bagi penulis dan menghargai setiap motivasi yang kalian berikan.

8. Untuk sahabat penulis dari masa Sekolah Dasar, Syahna Oktavia Prasetyo dan ucapan terima kasih juga untuk sahabat penulis dari SMA, Sabrina Azzahra yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis yang senantiasa memberikan kehangatan dan penghibur di saat-saat sulit perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini selesai.
9. Terakhir untuk Ghina Fairuz Rahardhian. Terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu, tetaplah mencoba bangkit. Terima kasih sudah berusaha kuat, sabar dan bertahan. Penulis berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini.

Penulis mengakui adanya keterbatasan dan kekeliruan dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis sangat menghargai masukan, saran, dan pendapat dari semua pihak untuk memperbaiki penelitian ini. Penulis juga mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua yang membutuhkan dan tertarik dengan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Penulis,

(Ghina Fairuz Rahardhian)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.5 Manfaat.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Pikir.....	20
2.4 Hipotesis Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Data dan Sumber Data.....	28
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian	30
3.5 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	41

4.2	Statistik Deskriptif Variabel	41
4.3	Hasil Regresi Data Panel.....	42
4.4	Uji Asumsi Klasik	45
4.5	Pengujian Hipotesis.....	46
4.6	Pembahasan.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Implikasi.....	53
5.3	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....		56
LAMPIRAN.....		62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel	32
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif.....	41
Tabel 4.2 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM).....	44
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Negara Afrika.....	62
Lampiran 2 : Data Panel Penelitian	64
Lampiran 3 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif	71
Lampiran 4 : Hasil Uji Chow.....	71
Lampiran 5 :Hasil Uji Hausman	72
Lampiran 6 :Hasil Uji Multikolinearitas.....	72
Lampiran 7 :Hasil Regresi Data Panel dengan Metode Fixed Effect Model (FEM).....	73
Lampiran 8 :Hasil Uji T	73

ABSTRACT

This research analyzes the determinants of e-participation in African countries, focusing on governance factors (control of corruption, rule of law, government effectiveness, voice and accountability), human resources, and telecommunications infrastructure. Using panel data regression analysis with Fixed Effect Model (FEM), this study involves data from 54 African countries based on information from the UN E-Government Survey and The Worldwide Governance Indicators (WGI). The results show that simultaneously, all independent variables significantly influence e-participation. Partially, government effectiveness, human resources, and telecommunications infrastructure have positive and significant effects, with human resources having the strongest influence. Meanwhile, control of corruption and rule of law show positive but insignificant relationships, while voice and accountability have a very small and insignificant negative effect. The coefficient of determination value of 23.48% indicates that there are still other factors influencing e-participation in Africa. This research provides recommendations for governments to prioritize investments in human resources development and telecommunications infrastructure, as well as improving government effectiveness to encourage public participation through digital platforms.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor determinan e-partisipasi di negara-negara Benua Afrika, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan (pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas), sumber daya manusia, serta infrastruktur telekomunikasi. Menggunakan metode analisis regresi data panel dengan model Fixed Effect (FEM), penelitian ini melibatkan data dari 54 negara Afrika berdasarkan informasi dari UN E-Government Survey dan The Worldwide Governance Indicators (WGI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap e-partisipasi. Secara parsial, efektivitas pemerintah, sumber daya manusia, dan infrastruktur telekomunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan, dengan sumber daya manusia memiliki pengaruh terkuat. Sementara itu, pengendalian korupsi dan hukum serta peraturan menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan, sedangkan suara dan akuntabilitas memiliki pengaruh negatif yang sangat kecil dan tidak signifikan. Nilai koefisien determinasi sebesar 23,48% mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap e-partisipasi di Afrika. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memprioritaskan investasi pada pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur telekomunikasi, serta peningkatan efektivitas pemerintahan untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui platform digital.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah secara fundamental. Transformasi digital ini telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk munculnya berbagai platform dan sistem yang memungkinkan partisipasi warga secara elektronik atau e-partisipasi. Di tengah revolusi digital global ini, negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika, menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mengadopsi dan mengimplementasikan sistem e-partisipasi yang efektif. E-partisipasi telah menjadi salah satu aspek penting dalam diskusi tentang partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan, terutama di negara-negara berkembang seperti di Afrika (Hidayati, 2019). Di era digital saat ini, e-partisipasi menawarkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Laporan *United Nations E-Government Survey 2022*, banyak negara di Afrika menunjukkan peningkatan dalam penggunaan platform digital untuk partisipasi publik, namun menurut data dari *World Bank*, hanya sekitar 30% penduduk di beberapa negara Afrika yang memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan digital yang besar yang perlu diatasi (Puspitaningrum, 2021).

E-partisipasi di negara-negara Afrika telah mengalami evolusi yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Konsep e-partisipasi sendiri merujuk pada keterlibatan warga dalam proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). *United Nations Development Programme (UNDP)* mendefinisikan e-partisipasi sebagai "penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas dan memperdalam partisipasi politik dengan memungkinkan warga untuk terhubung satu sama lain dan dengan wakil terpilih mereka" (UNDP, 2023). Di benua Afrika, implementasi e-partisipasi telah menjadi bagian integral dari agenda transformasi digital yang lebih luas yang diadopsi oleh Uni Afrika dalam "*Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030)*" yang bertujuan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan inklusi sosial dan pembangunan ekonomi (African Union, 2020).

Dinamika implementasi e-partisipasi di Afrika sangat beragam di antara 54 negara di benua tersebut. Rwanda, misalnya, telah muncul sebagai pemimpin regional dalam e-

governance dengan inisiatif seperti "Irembo"—portal layanan pemerintah daring yang memungkinkan warga untuk mengakses lebih dari 100 layanan pemerintah dan berpartisipasi dalam konsultasi publik daring. Menurut data dari *Rwanda Information Society Authority* (RISA), portal ini telah digunakan oleh lebih dari 2 juta warga Rwanda sejak 2015, menunjukkan tingkat adopsi yang relatif tinggi meskipun tantangan infrastruktur yang ada (RISA, 2023). Sebaliknya, negara-negara seperti Somalia dan Sudan, yang terkena dampak konflik berkepanjangan, menghadapi hambatan signifikan dalam mengimplementasikan inisiatif e-partisipasi yang komprehensif.

UN E-Participation Index (EPI) tahun 2022 menunjukkan kesenjangan substansial dalam implementasi e-partisipasi di seluruh benua Afrika. Mauritius (peringkat 33 global), Afrika Selatan (peringkat 61), dan Mesir (peringkat 68) berada di peringkat teratas di benua ini, sedangkan negara-negara seperti Chad, Sudan Selatan, dan Eritrea berada di antara peringkat terendah secara global (United Nations, 2022). Indeks ini mengukur tiga dimensi utama e-partisipasi: penyediaan informasi elektronik, konsultasi elektronik, dan pengambilan keputusan elektronik. Disparitas dalam peringkat ini mencerminkan perbedaan substansial dalam kapasitas kelembagaan, kerangka kerja regulasi, dan infrastruktur digital di berbagai negara Afrika.

Menurut studi komparatif oleh *African Development Bank* (2023), inisiatif e-partisipasi di Afrika dapat dikategorikan ke dalam lima tipologi utama: (1) portal informasi pemerintah yang menyediakan informasi satu arah kepada warga; (2) platform konsultatif yang memungkinkan umpan balik dari warga tentang kebijakan yang diusulkan; (3) sistem pengajuan keluhan digital yang memungkinkan pelaporan masalah layanan publik; (4) aplikasi anggaran partisipatif yang memungkinkan warga untuk memengaruhi alokasi sumber daya; dan (5) platform kolaboratif yang memungkinkan warga untuk ikut menciptakan solusi bersama pemerintah. Kenya, misalnya, telah mengembangkan platform partisipatif berbasis SMS untuk menciptakan keterlibatan dalam perencanaan kota di Nairobi, mengakui keterbatasan penetrasi internet di beberapa segmen populasi (Olang et al., 2022).

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada tingkat e-partisipasi adalah Pengendalian Korupsi. Korupsi dapat menghambat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi partisipasi publik. Transparency International menjelaskan negara-negara Afrika sering kali menghadapi masalah korupsi yang parah, yang tidak hanya memengaruhi kebijakan publik tetapi juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Mkhize et al., 2024). Dalam konteks ini, penelitian ini akan

mengkaji hubungan antara kontrol korupsi dan e-partisipasi di beberapa negara Afrika yang memiliki tingkat korupsi yang berbeda.

Hukum dan Peraturan juga merupakan komponen vital dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk e-partisipasi. Keadilan dan penegakan hukum yang kuat memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat secara aktif tanpa takut akan represalias. Di banyak negara Afrika, ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia sering kali menghambat partisipasi publik (Jamaluddin, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum dan peraturan memengaruhi e-partisipasi, dengan fokus pada negara-negara yang menerapkan reformasi hukum.

Efektivitas Pemerintah sebagai variabel penentu menunjukkan seberapa baik pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Efektivitas pemerintahan berhubungan erat dengan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan, pada gilirannya, tingkat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Data dari *World Bank Governance Indicators* tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak negara Afrika masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas pemerintahan dengan rata-rata nilai untuk efektivitas pemerintahan di Afrika pada tahun 2022 adalah -0,77, dengan Mauritius sebagai negara dengan nilai tertinggi (0,75) dan Somalia dengan nilai terendah (-2,03), yang dapat berimplikasi pada rendahnya e-partisipasi (The Global Economy.com, 2023).

Suara dan Akuntabilitas mencerminkan kemampuan masyarakat untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Dalam konteks Afrika, di mana banyak negara mengalami pembatasan kebebasan berbicara, penting untuk memahami bagaimana hal ini memengaruhi partisipasi digital (Isser et al., 2024). Sumber Daya Manusia juga menjadi landasan penting untuk meningkatkan e-partisipasi. Pendidikan dan keterampilan digital yang memadai memungkinkan individu untuk terlibat secara aktif dalam platform e-partisipasi (Ghanem, 2018). UNESCO dalam Gajali (2023) menjelaskan tingkat pendidikan di Afrika bervariasi secara signifikan, dan hal ini berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam partisipasi publik.

Infrastruktur Telekomunikasi merupakan faktor teknis yang tidak dapat diabaikan dalam analisis e-partisipasi. Akses yang baik terhadap infrastruktur telekomunikasi sangat penting untuk mendorong partisipasi digital (Nursetiawan et al., 2023). *International Telecommunication Union* (ITU) dalam (Arakpogun et al., 2023)

mengemukakan meskipun ada kemajuan dalam infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah, masih banyak daerah di Afrika yang mengalami kesulitan akses internet.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang determinan e-partisipasi di negara-negara Afrika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori partisipasi publik di era digital.

Secara keseluruhan, analisis faktor-faktor yang memengaruhi e-partisipasi di negara-negara Afrika merupakan langkah penting untuk memahami dinamika pemerintahan dan partisipasi publik di era digital. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang variabel-variabel ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam kualitas pemerintahan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara Afrika" yang akan membahas secara mendalam hubungan antara pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, sumber daya manusia, dan infrastruktur telekomunikasi dengan e-partisipasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal yang jelas dan mendalam tentang subjek yang relevan dan penting dalam konteks Afrika saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Pengendalian Korupsi (*Control of Corruption*) terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-Participation*)?
2. Bagaimana pengaruh Hukum dan Peraturan (*Rule of Law*) terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-Participation*)?
3. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pemerintah (*Government Effectiveness*) terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-Participation*)?
4. Bagaimana pengaruh Suara dan Akuntabilitas (*Voice and Accountability*) terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-Participation*)?
5. Bagaimana pengaruh Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) terhadap tingkat E-Partisipasi (*E-Participation*)?

6. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi (Telecommunication Infrastructure) terhadap tingkat E-Partisipasi (E-Participation)?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini akan dibatasi pada negara-negara di benua Afrika-
2. Variabel Penelitian: Penelitian ini akan menganalisis enam variabel determinan e-partisipasi, yaitu: Pengendalian Korupsi, Hukum dan Peraturan, Efektivitas Pemerintah, Suara dan Akuntabilitas, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Telekomunikasi
3. Penelitian ini akan fokus pada hubungan antara e-partisipasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya, tanpa membahas secara mendalam tentang metode atau platform spesifik yang digunakan untuk e-partisipasi.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis dan meneliti pengaruh Pengendalian Korupsi (COC) terhadap E-Partisipasi (EPT) di negara Afrika
2. Menganalisis dan meneliti pengaruh Hukum dan Peraturan (ROL) terhadap E-Partisipasi (EPT) di negara Afrika
3. Menganalisis dan meneliti pengaruh Efektivitas Pemerintah (GEV) terhadap E-Partisipasi (EPT) di negara Afrika
4. Menganalisis dan meneliti pengaruh Suara dan Akuntabilita (VOA) terhadap E-Partisipasi (EPT) di negara Afrika
5. Menganalisis dan meneliti pengaruh Sumber Daya Manusia (HUC) terhadap E-Partisipasi (EPT) di negara Afrika
6. Menganalisis dan meneliti pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi (TI) terhadap E-Partisipasi (EPT) di negara Afrika

1.5 Manfaat

Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan e-partisipasi masyarakat.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya e-partisipasi dan cara mereka dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Memberikan panduan bagi organisasi non-pemerintah dan lembaga masyarakat sipil dalam mengembangkan program-program yang mendorong partisipasi digital.
4. Memberikan rekomendasi terkait pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang diperlukan untuk mendukung e-partisipasi, terutama di daerah terpencil.
5. Menyediakan dasar bagi program pendidikan dan pelatihan yang mendukung keterampilan digital di kalangan masyarakat.

Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori-teori partisipasi publik dan e-partisipasi, khususnya dalam konteks negara-negara Afrika.
2. Membantu dalam memahami keterkaitan antara berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi e-partisipasi, serta menjadikan ini sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengikuti kerangka sistematis yang terdiri dari lima bab utama, disusun secara kohesif dan sekuensial untuk memastikan kejelasan dan alur logis penulisan ilmiah.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pembuka ini berfungsi sebagai orientasi awal bagi pembaca, menyajikan landasan kontekstual penelitian yang mencakup latar belakang permasalahan, formulasi masalah yang diidentifikasi, sasaran dan maksud penelitian, kontribusi dan signifikansi studi, serta gambaran umum organisasi penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teoritis secara mendalam yang menjadi fondasi pengembangan hipotesis. Di dalamnya terkandung eksplorasi komprehensif literatur terkait, konstruksi kerangka pemikiran logis penelitian, dan perumusan hipotesis yang akan diuji.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bagian metodologis ini menjabarkan secara terperinci setiap tahapan dan elemen proses penelitian. Komponen-komponen yang diuraikan meliputi desain dan pendekatan penelitian, definisi dan cakupan populasi serta teknik sampling,

prosedur dan instrumen pengumpulan data, serta metode analisis yang diimplementasikan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai inti substansial penelitian, bab ini menyajikan temuan-temuan empirikal hasil analisis data yang telah dikumpulkan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya. Temuan tersebut diikuti dengan interpretasi komprehensif dan diskusi mendalam yang mengaitkan hasil dengan kerangka teoritis.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup menghadirkan sintesis penelitian berupa ringkasan temuan utama, implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian, rekomendasi untuk penelitian lanjutan, serta keterbatasan studi yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan, sebagaimana diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan konflik kepentingan. Mereka berpendapat bahwa agen mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan prinsipal, terutama ketika terdapat perbedaan informasi dan insentif. Hal ini sangat relevan dalam konteks pemerintahan, di mana masyarakat sebagai prinsipal mengharapkan pemerintah bertindak transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Eisenhardt (1989) menekankan pentingnya desain kontrak dan mekanisme pengawasan dalam mengurangi masalah keagenan. Ia berargumen bahwa dengan adanya kontrol yang baik dan pengawasan yang efektif, agen akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks e-partisipasi, pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Fama dan Jensen (1983) menggarisbawahi bahwa pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam organisasi dapat memperburuk masalah keagenan. Mereka menyatakan bahwa ketika kontrol tidak sejalan dengan kepemilikan, potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh agen meningkat. Dalam konteks pemerintahan, hal ini menggambarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab kepada publik.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori keagenan memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dinamika antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks e-partisipasi. Dengan mengacu pada pendapat para ahli, penelitian ini menggunakan teori keagenan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti pengendalian korupsi, efektivitas pemerintah, dan akuntabilitas berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi publik di negara-negara Afrika. Teori ini membantu menjelaskan hubungan kompleks antara masyarakat dan pemerintah serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

2.1.2 E-Partisipasi (EPT)

a. Pengertian

E-partisipasi merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi partisipasi warga dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan pemerintahan. Menurut Macintosh (2004), e-partisipasi adalah upaya untuk menghubungkan warga dengan pemerintah dan pembuat kebijakan melalui teknologi digital untuk mendorong partisipasi yang efektif dalam proses demokrasi. Ini mencakup berbagai bentuk interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat.

United Nations (2020) mendefinisikan e-partisipasi sebagai proses melibatkan warga melalui teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan kebijakan, perancangan dan penyampaian layanan untuk membuat proses tersebut lebih partisipatif, inklusif, dan deliberatif. E-partisipasi menjadi sarana penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan.

b. Dimensi E-Partisipasi

Menurut Tambouris et al. (2007), e-partisipasi memiliki beberapa dimensi utama:

1) E-Informasi

Penyediaan informasi secara online tentang kebijakan dan layanan pemerintah kepada warga. Ini merupakan tingkat dasar dari e-partisipasi di mana pemerintah secara proaktif menyebarkan informasi atau warga dapat mengakses informasi sesuai permintaan.

2) E-Konsultasi

Platform digital yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan terhadap kebijakan dan layanan publik. Ini mencakup *survei online*, forum diskusi, dan *platform* umpan balik lainnya.

3) E-Pengambilan Keputusan

Melibatkan warga secara langsung dalam proses pengambilan keputusan melalui *platform digital*, termasuk *e-voting* dan sistem partisipasi anggaran *online*.

c. Manfaat E-Partisipasi

Menurut Wirtz dan Daiser (2018), e-partisipasi memberikan beberapa manfaat penting:

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
- 2) Mendorong keterlibatan warga yang lebih luas dalam proses demokrasi

- 3) Meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan masukan publik
- 4) Memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah dan warga
- 5) Mengurangi hambatan geografis dan temporal dalam partisipasi publik

d. Tantangan Implementasi

Menurut Sæbø et al. (2008), implementasi e-partisipasi menghadapi beberapa tantangan utama:

- 1) Kesenjangan digital dan akses teknologi
- 2) Kurangnya kesadaran dan motivasi warga
- 3) Masalah keamanan dan privasi data
- 4) Keterbatasan infrastruktur teknologi
- 5) Resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi

Dari perspektif ini, penelitian merujuk pada definisi Macintosh yang menekankan pentingnya e-partisipasi sebagai jembatan antara warga dan pemerintah. Pemahaman ini penting dalam konteks Afrika, di mana e-partisipasi dapat menjadi alat untuk mengatasi hambatan partisipasi tradisional dan meningkatkan keterlibatan warga dalam proses demokrasi.

2.1.3 Pengendalian Korupsi (COC)

a. Pengertian

Pengendalian korupsi merupakan komponen krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengendalian korupsi melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghukum tindakan korupsi. Tanpa adanya pengendalian yang efektif, upaya untuk mempromosikan e-partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan sia-sia (Fikri Ardiansyah, 2024). Korupsi tidak hanya merusak integritas institusi pemerintahan tetapi juga mengurangi partisipasi publik yang esensial dalam proses demokrasi.

Pengendalian korupsi di negara-negara berkembang, khususnya di Afrika, memerlukan pendekatan yang holistik. Reformasi institusi, peningkatan transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam mengatasi korupsi. Dalam konteks ini, e-partisipasi dapat berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan (Ekoprodjo & Wibowo, 2024). Mkhize et al., (2024) juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa korupsi di Afrika sering kali diperparah oleh kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Mereka berargumen bahwa tanpa pengendalian

yang efektif, tantangan dalam menciptakan ruang bagi partisipasi publik akan semakin besar.

Oleh karena itu, pada penelitian ini merujuk pada pendapat Fikri Ardiansyah yang memberikan perspektif komprehensif tentang pengendalian korupsi. Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam mengatasi korupsi sangat bergantung pada kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat lebih terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga memperkuat partisipasi publik yang esensial dalam proses pemerintahan.

b. Jenis-jenis korupsi

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang diidentifikasi dalam berbagai bentuk. Para ahli telah mengklasifikasikan jenis-jenis korupsi untuk memahami dampaknya dan merumuskan strategi pengendalian yang efektif.

1. Suap

Suap adalah salah satu bentuk korupsi yang paling umum, di mana seseorang memberikan imbalan kepada pejabat publik untuk mendapatkan keputusan atau layanan tertentu. Menurut Rose-Ackerman (1999), suap menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, karena keputusan yang diambil tidak berdasarkan pada prinsip yang adil dan transparan. Suap sering kali merusak integritas institusi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2. Penggelapan

Penggelapan terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mengambil aset atau dana publik untuk kepentingan pribadi. (Botero-Rodríguez et al., 2022) menyatakan bahwa penggelapan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Penggelapan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan dana proyek hingga manipulasi laporan keuangan.

3. Nepotisme

Nepotisme adalah praktik memberikan keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dalam proses pengambilan keputusan, terlepas dari kualifikasi mereka. (Tingka Febry Tory & Rizkia Amelia Hanum, 2024) menjelaskan bahwa nepotisme merusak prinsip meritokrasi dan dapat mengakibatkan pengabaian terhadap individu yang lebih kompeten. Hal ini sering kali

menghasilkan keputusan yang tidak optimal dan menurunkan kualitas layanan publik.

4. Kolusi

Kolusi melibatkan persekongkolan antara pejabat publik dan pihak swasta untuk mencapai keuntungan yang merugikan kepentingan publik. Bardhan (1997) mencatat bahwa kolusi dapat terjadi dalam bentuk pengaturan kontrak yang tidak transparan atau kesepakatan untuk menyembunyikan praktik korupsi. Kolusi sering kali menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat, di mana perusahaan-perusahaan yang berintegritas terpinggirkan.

5. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan kekuasaan yang diberikan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ressel Ulia et al., (2024) mengemukakan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, termasuk penurunan kualitas layanan publik dan redistribusi sumber daya yang tidak adil.

2.1.4 Hukum dan peraturan (ROL)

a. Peran hukum dalam e-participasi

Hukum dan peraturan adalah fondasi penting bagi keberlangsungan pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat. Hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok, tetapi juga menciptakan kerangka kerja bagi interaksi sosial (Rahim et al., 2024). Dalam konteks e-partisipasi, hukum dan peraturan yang jelas dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk berpartisipasi tanpa takut akan represalias. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Dworkin dalam (Efendi, 2024) menekankan bahwa hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Ia berargumen bahwa hukum yang adil dan transparan akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks negara-negara Afrika, di mana banyak negara menghadapi tantangan hukum yang kompleks, penting untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan mendukung partisipasi publik. (Kurnia Zaetama, 2024) juga menambahkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan sosial dan ekonomi, serta melindungi hak-hak individu.

Rachmad et al., (2023) mengemukakan bahwa sistem hukum yang kuat dan efektif dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan partisipasi masyarakat. Mereka menekankan bahwa hukum yang dapat diandalkan akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks e-partisipasi, hukum yang jelas dan dapat dipahami akan memberi masyarakat keyakinan untuk menggunakan platform digital dalam memberikan masukan dan berinteraksi dengan pemerintah.

Penelitian ini merujuk pada pendapat (Rahim et al., 2024) yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam sistem hukum. Hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dan peraturan sangat penting dalam mendorong e-partisipasi di negara-negara Afrika, di mana keadilan dan transparansi sering kali menjadi tantangan.

b. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Regulasi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar utama dalam tata kelola yang baik, khususnya dalam konteks regulasi. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah dan lembaga publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas dapat diukur melalui kemampuan masyarakat untuk meminta penjelasan atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Di sisi lain, transparansi merujuk pada sejauh mana informasi tentang proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.

(Falah et al., 2024) menekankan bahwa transparansi yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan memperkuat partisipasi. Keduanya saling terkait; ketika informasi tentang keputusan dan tindakan pemerintah tersedia secara luas, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, yang menciptakan kondisi di mana pejabat publik merasa lebih bertanggung jawab. (Lathifah et al., 2024) menunjukkan bahwa transparansi yang efektif mendorong akuntabilitas, karena masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban ketika informasi yang diperlukan tersedia. Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam regulasi dapat dilakukan melalui kebijakan yang jelas dan terbuka, seperti

pengembangan mekanisme untuk memastikan bahwa semua proses regulasi dapat diakses oleh publik.

(Fitri, 2021) menyarankan bahwa laporan kinerja, audit, dan evaluasi kebijakan harus disediakan kepada masyarakat. Dalam era digital, teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; Heeks (2002) mencatat bahwa platform digital dapat menyediakan akses real-time ke informasi publik, memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi dalam regulasi bukan hanya merupakan prinsip ideal, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, responsif, dan demokratis, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.5 Efektifitas Pemerintah (GEV)

a. Definisi

Efektivitas pemerintah merupakan indikator kunci dalam menilai kinerja suatu negara dalam menyediakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Efektivitas pemerintah dapat diukur dari sejauh mana pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pemerintah yang efektif tidak hanya mampu menjalankan fungsi-fungsinya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat (Ayu Puji Laksmi Dewi & Mariadi, 2021).

Osborne dan Gaebler (1992) mengemukakan bahwa pemerintah harus berfokus pada hasil dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Mereka menekankan pentingnya inovasi dan responsivitas dalam pelayanan publik. Efektivitas pemerintah dapat meningkat jika ada pendekatan yang lebih proaktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui platform digital. Dengan demikian, e-partisipasi menjadi salah satu alat untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Meyer dan Rowan (1977) juga menekankan bahwa legitimasi institusi pemerintah sangat berpengaruh terhadap efektivitasnya. Mereka berargumen bahwa pemerintah yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat akan lebih mudah untuk menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan. Ketika masyarakat merasa terlibat dan diakui dalam proses pemerintahan, hal ini akan meningkatkan

kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan yang diambil. Dalam hal ini, e-partisipasi dapat berkontribusi pada legitimasi pemerintah dengan memberikan ruang bagi suara masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian ini merujuk pada pendapat Osborne dan Gaebler, yang menekankan pentingnya inovasi dan fokus pada hasil dalam meningkatkan efektivitas pemerintah. Mereka menggarisbawahi bahwa dengan memanfaatkan e-partisipasi, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, efektivitas pemerintah dalam konteks e-partisipasi menjadi sangat penting untuk diteliti, khususnya di negara-negara Afrika yang menghadapi tantangan dalam hal legitimasi dan responsivitas.

b. Indikator Efektifitas Pemerintah

Indikator efektivitas pemerintah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Farhani & Fachri Adnan, 2021). Efektivitas pemerintah mencerminkan kemampuan suatu pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, menjalankan fungsi administratif, dan merespons aspirasi warganya. Beberapa indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah adalah sebagai berikut (Sakir & Kunci, 2024)

1) Kualitas Layanan Publik

Indikator ini mengukur seberapa baik pemerintah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kualitas layanan publik dapat dinilai melalui survei kepuasan masyarakat, yang memberikan gambaran tentang persepsi warga terhadap efektivitas layanan yang diterima.

2) Akuntabilitas dan Transparansi

Indikator ini menilai sejauh mana pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya. Akuntabilitas dapat diukur melalui mekanisme pelaporan, audit, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi, di sisi lain, mencakup aksesibilitas informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

3) Responsivitas Pemerintah

Responsivitas mengukur seberapa cepat dan efektif pemerintah dalam menanggapi isu-isu dan kebutuhan masyarakat. Indikator ini dapat mencakup

waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan publik, kecepatan dalam menerapkan kebijakan baru, serta kemampuan pemerintah dalam mengadaptasi kebijakan sesuai dengan dinamika masyarakat.

4) Partisipasi Publik

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan juga merupakan indikator penting dari efektivitas pemerintah. Partisipasi dapat diukur melalui jumlah warga yang terlibat dalam pemilihan umum, forum publik, atau konsultasi kebijakan. Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa pemerintah berhasil melibatkan masyarakat dalam proses demokrasi.

5) Stabilitas Sosial dan Politik

Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat. Stabilitas dapat diukur melalui tingkat konflik sosial, kekerasan, atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah yang efektif cenderung menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi warganya.

6) Kinerja Ekonomi

Indikator ini berfokus pada kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kinerja ekonomi dapat diukur melalui indikator seperti pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, dan distribusi pendapatan. Pemerintah yang efektif mampu menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks global, berbagai organisasi internasional seperti *World Bank* dan *United Nations* telah mengembangkan indeks dan alat ukur untuk menilai efektivitas pemerintah secara komparatif. Misalnya, *Index of Governance* yang mengukur aspek-aspek seperti stabilitas politik, efisiensi pemerintahan, dan pengendalian korupsi. Secara keseluruhan, indikator efektivitas pemerintah merupakan alat penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan. Dengan memahami indikator-indikator ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan demi kesejahteraan bersama.

2.1.6 Suara dan Akuntabilitas (VOA)

Suara dan akuntabilitas merupakan dua komponen penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sen (1999) berpendapat suara masyarakat adalah aspek fundamental dari demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, partisipasi publik tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintah, tetapi juga mendorong akuntabilitas dengan memungkinkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban dari para pemimpin mereka.

(Wardana et al., 2024) menekankan bahwa akuntabilitas pemerintah adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ia berargumen bahwa ketika pemerintah tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Suara masyarakat yang kuat dapat berfungsi sebagai pengawas bagi tindakan pemerintah, sehingga mendorong transparansi dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik.

(Resmadiktia et al., 2023) juga menyoroti pentingnya mekanisme akuntabilitas dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya melibatkan pertanggungjawaban setelah tindakan diambil, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah berkomunikasi dan mendengarkan suara masyarakat. Dalam konteks ini, e-partisipasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang diambil.

Penelitian ini merujuk pada pendapat Sen, yang menekankan bahwa suara masyarakat adalah elemen dasar dari demokrasi. Sen berargumen bahwa dengan memperkuat suara masyarakat, kita dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, yang pada gilirannya dapat mendorong keterlibatan lebih lanjut dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika antara suara dan akuntabilitas dalam konteks e-partisipasi, terutama di negara-negara Afrika yang menghadapi tantangan dalam hal partisipasi publik.

2.1.7 Sumber Daya Manusia (HUC)

Sumber Daya Manusia merupakan konsep yang menekankan peningkatan kualitas hidup individu dan komunitas dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Amartya Sen (1999), Pembangunan atau sumber daya manusia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk

mencapai potensi mereka. Sen memperkenalkan pendekatan "kapabilitas", yang menekankan pentingnya memberikan setiap individu kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan menjalani kehidupan yang bermakna.

Mahbub ul Haq (1995) melanjutkan pemikiran ini dengan mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur kemajuan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Ia berargumen bahwa fokus pada sumber daya manusia dapat membantu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan pemberdayaan individu melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan kesempatan.

Khunaivi et al., (2023) juga menekankan pentingnya Pembangunan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ia berpendapat bahwa untuk mengatasi tantangan global, seperti kemiskinan dan ketidakadilan, diperlukan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada manusia. Pembangunan manusia harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa pembangunan manusia mencakup pembentukan institusi yang mendukung hak asasi manusia dan partisipasi politik. Mereka berargumen bahwa dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, individu akan lebih mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik.

Penelitian ini merujuk pada pendapat Amartya Sen, yang menekankan pentingnya pendekatan kapabilitas dalam pembangunan manusia. Sen berargumen bahwa fokus pada kemampuan individu untuk mencapai potensi mereka sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan demikian, pemahaman tentang pembangunan manusia sangat relevan dalam konteks e-partisipasi, terutama di negara-negara Afrika yang menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.8 Infrastruktur Telekomunikasi (*Telecommunication Infrastructure*)

Infrastruktur telekomunikasi merupakan komponen vital dalam mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Castells (2000) menjelaskan

infrastruktur telekomunikasi berperan sebagai "jaringan komunikasi" yang memungkinkan aliran informasi dan ide. Ia berargumen bahwa akses yang luas terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan keterlibatan publik dalam berbagai aspek kehidupan.

Friedman (2005) menambahkan bahwa infrastruktur telekomunikasi juga berfungsi sebagai pendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa negara-negara dengan infrastruktur telekomunikasi yang maju memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menarik investasi dan mendorong perkembangan bisnis. Infrastruktur yang efisien dan handal memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara optimal, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Dharmajaya et al., 2024) menekankan pentingnya akses universal terhadap infrastruktur telekomunikasi sebagai langkah untuk mengurangi kesenjangan digital. Laporan mereka menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang inklusif cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam proses pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Graham dan Marvin (2001) menyatakan bahwa perkembangan infrastruktur telekomunikasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana. Mereka berargumen bahwa investasi dalam infrastruktur tidak hanya harus fokus pada teknologi terbaru, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Penelitian ini merujuk pada pendapat Castells, yang menekankan bahwa infrastruktur telekomunikasi berfungsi sebagai jaringan komunikasi yang esensial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Castells berargumen bahwa akses yang baik terhadap TIK tidak hanya meningkatkan keterlibatan publik tetapi juga mendorong proses demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang infrastruktur telekomunikasi sangat penting dalam konteks e-partisipasi, terutama di negara-negara Afrika yang masih menghadapi tantangan dalam hal akses dan kualitas layanan telekomunikasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1	Robinah Nabafu, Johnson Ssekakubo, Catherine Nyesiga, Zuhrah Nantege (2021)	Saluran e-partisipasi, Persepsi kemudahan penggunaan, Kepercayaan pemerintah, Intensi perilaku	Hubungan positif signifikan antara variabel yang diuji dan keterlibatan warga. Menghasilkan model baru Keterlibatan Warga dengan memperluas model TAM Davis (1989). Implikasi penting untuk pembuat kebijakan.
2	Princely Ifinedo, Amar Anwar, Danny Cho (2021)	GDP per kapita, Infrastruktur TIK, Pendaftaran pendidikan menengah, Output teknologi, Suara & akuntabilitas	Kemajuan e-partisipasi dipengaruhi positif oleh suara dan akuntabilitas, GDP per kapita, dan infrastruktur TIK. Determinan bervariasi sesuai konteks geografis dan tingkat pendapatan.
3	Mohammed Adnan, Masitah Ghazali, Nur Zuraifah Syazrah Othman (2022)	Faktor teknologi, Faktor sosial, Faktor kelembagaan	Proyek <i>e-government</i> mengubah cara institusi pemerintah berkomunikasi dan berinteraksi dengan warga. Tanpa pendekatan komprehensif, risiko rendahnya keterlibatan publik. Penelitian ini menyoroti tantangan dan peluang e-partisipasi.
4	Robinah Nabafu, Musa Bukoma Moya, Geoffrey Mayoka Kituyi (2023)	Institusi politik, Infrastruktur TIK, Jaringan sosial	Institusi politik, infrastruktur TIK, dan jaringan sosial memengaruhi motivasi diri dan keterlibatan. Motivasi diri memediasi hubungan antara variabel yang diuji. Implikasi praktis menunjukkan pentingnya institusi politik dalam e-partisipasi.

2.3 Kerangka Pikir

Dalam era digital saat ini, e-partisipasi menjadi konsep yang semakin krusial karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran vital dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Indeks e-partisipasi mengukur seberapa banyak individu menggunakan platform digital untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik. Beberapa faktor yang memengaruhi indeks e-partisipasi mencakup pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, sumber daya manusia, serta infrastruktur telekomunikasi.

Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah pengendalian korupsi. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan cenderung lebih tinggi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang

rendah. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah beroperasi secara transparan dan akuntabel, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi secara elektronik.

Prinsip hukum dan peraturan juga memainkan peran penting, memastikan bahwa semua individu dan organisasi, termasuk pemerintah, terikat oleh hukum. Negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan adil mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat akan lebih berani menggunakan platform digital untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

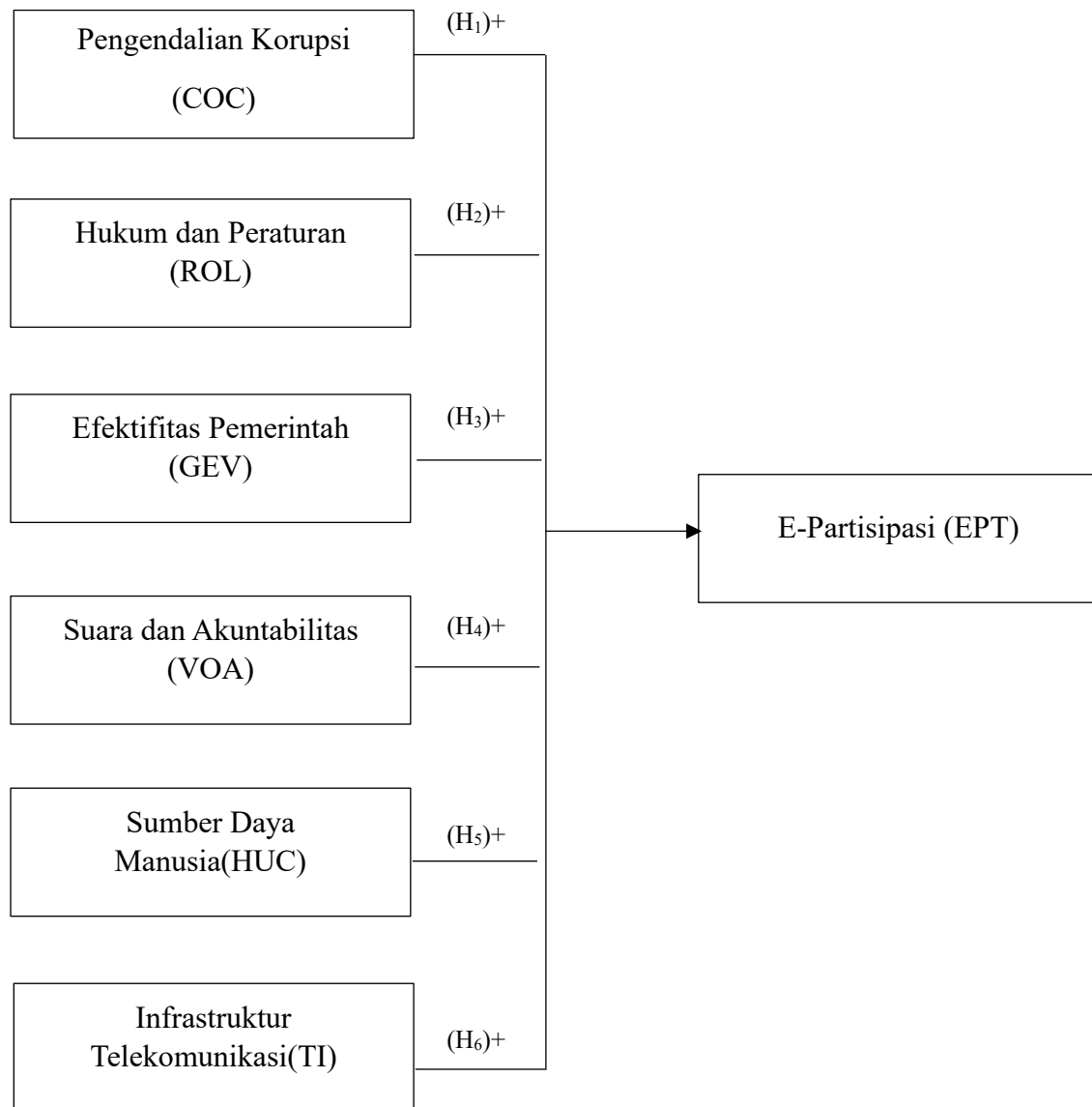
Efektivitas pemerintah dalam memberikan layanan publik yang baik turut memengaruhi e-partisipasi. Pemerintah yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi yang jelas dan akses yang mudah ke layanan publik. Ketika masyarakat yakin bahwa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan mereka, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi secara elektronik.

Suara dan akuntabilitas mencerminkan seberapa besar masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan seberapa bertanggung jawab pemerintah terhadap kebijakan yang diambil. Negara-negara yang memberikan kebebasan berbicara dan ruang partisipasi politik bagi warganya cenderung memiliki tingkat e-partisipasi yang lebih tinggi.

Sumber daya manusia, yang mencakup pendidikan dan keterampilan, juga sangat penting untuk meningkatkan e-partisipasi. Pendidikan yang baik memberikan masyarakat pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam proses pemerintahan. Dengan peningkatan akses pendidikan, masyarakat menjadi lebih antusias dalam memanfaatkan platform digital untuk berpartisipasi.

Akhirnya, infrastruktur telekomunikasi yang memadai, dengan akses internet yang luas dan berkualitas tinggi, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tanpa infrastruktur yang memadai, masyarakat tidak akan dapat menggunakan platform digital yang diperlukan untuk berkontribusi dalam proses pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana negara-negara di Afrika, dengan menganalisis faktor-faktor determinan e-partisipasi, dapat meningkatkan partisipasi publik melalui pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, sumber daya manusia, serta infrastruktur telekomunikasi.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pengendalian Korupsi (COC) terhadap Tingkat E-Partisipasi (EPT)

Di negara-negara Afrika, korupsi merupakan tantangan signifikan yang menghambat efektivitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Ketika praktik korupsi merajalela, masyarakat cenderung skeptis terhadap inisiatif pemerintah, termasuk *platform e-participation*, karena adanya persepsi bahwa suara mereka tidak akan didengar atau disalahgunakan. Studi oleh Akomea-Frimpong et al. (2020) menunjukkan bahwa negara-negara Afrika dengan indeks pengendalian korupsi yang lebih tinggi memiliki tingkat adopsi e-government yang lebih baik. Sementara itu, penelitian Adeyeye dan Fagbemi (2021) mengonfirmasi bahwa upaya pemberantasan korupsi di beberapa negara Afrika telah berhasil meningkatkan kepercayaan warga terhadap sistem digital

pemerintah, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam konsultasi kebijakan publik secara daring.

Pengendalian korupsi menciptakan lingkungan kelembagaan yang kondusif bagi perkembangan e-partisipasi di Afrika. Transparansi yang meningkat akibat pengendalian korupsi mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan warga, sehingga mendorong keterlibatan publik yang lebih bermakna dalam platform digital pemerintah. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis bahwa pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap tingkat e-partisipasi di negara-negara Afrika, di mana semakin efektif upaya pengendalian korupsi yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam inisiatif digital pemerintah.

2.4.2 Pengaruh Hukum dan Peraturan (ROL) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)

Kerangka hukum dan peraturan memainkan peran krusial dalam mendorong atau menghambat adopsi e-partisipasi di suatu negara. Ketika pemerintah menetapkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai privasi data, keamanan siber, dan perlindungan hak digital warga, kepercayaan masyarakat terhadap platform e-partisipasi cenderung meningkat. Penelitian oleh Marzuki dan Ibrahim (2022) menunjukkan bahwa negara dengan peraturan yang mendukung kebebasan berekspresi dan menjamin keamanan data pribadi mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat keterlibatan warga pada platform digital pemerintah. Sebaliknya, regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi atau tidak memberikan perlindungan memadai terhadap data pribadi justru menciptakan ketidakpercayaan dan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam inisiatif *e-government*.

Dalam konteks *institutional theory*, kerangka hukum yang kuat menciptakan legitimasi dan kepastian bagi pengguna platform e-partisipasi. Regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas akan mengurangi hambatan kelembagaan dalam adopsi teknologi pemerintahan digital. Hal ini sejalan dengan temuan Ndou dan Khoza (2023) yang mengidentifikasi korelasi positif antara kualitas kerangka regulasi dengan tingkat e-partisipasi di berbagai negara berkembang. Mereka menemukan bahwa negara dengan peraturan yang memberikan jaminan hukum terhadap partisipasi digital warga memiliki tingkat e-partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan kerangka hukum yang lemah. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis bahwa kualitas hukum dan peraturan berpengaruh positif terhadap tingkat e-partisipasi, di mana semakin baik dan komprehensif kerangka regulasi yang

ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat keterlibatan masyarakat dalam platform digital pemerintah.

2.4.3 Pengaruh Efektivitas Pemerintah (GEV) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)

Efektivitas pemerintah menjadi faktor determinan bagi keberhasilan implementasi dan adopsi platform e-partisipasi. Pemerintah yang efektif memiliki kapasitas teknis, administratif, dan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur digital yang berkualitas serta mampu merespon masukan masyarakat secara cepat dan tepat. Menurut penelitian Sukmadilaga dan Pratama (2021), negara dengan indeks efektivitas pemerintah yang tinggi menunjukkan tingkat e-partisipasi yang lebih signifikan karena kemampuan mereka mengelola layanan publik digital dengan baik dan responsif. Ketika warga negara melihat bahwa partisipasi mereka melalui platform digital benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, kepercayaan dan minat untuk terus berpartisipasi akan meningkat secara berkelanjutan.

Berdasarkan *resource-based view*, pemerintah yang efektif mampu mengalokasikan sumber daya dengan lebih optimal untuk mendukung infrastruktur dan program e-government, termasuk inisiatif e-partisipasi. Mereka juga cenderung memiliki kapabilitas yang lebih baik dalam mengelola perubahan organisasi dan budaya yang diperlukan untuk transformasi digital. Studi komparatif oleh Rana dan Dwivedi (2022) mengkonfirmasi bahwa negara-negara dengan birokrasi yang efisien dan profesional memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam mengimplementasikan platform e-partisipasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah tidak hanya berpengaruh pada tahap awal pengembangan platform, tetapi juga pada keberlanjutan dan dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis bahwa efektivitas pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat e-partisipasi, di mana semakin efektif suatu pemerintahan dalam menjalankan fungsinya, semakin tinggi pula tingkat e-partisipasi warga negaranya.

2.4.4 Pengaruh Sumber Daya Manusia (HUC) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)

Sumber daya manusia, yang tercermin dalam tingkat pendidikan, literasi digital, dan keterampilan teknologi masyarakat, merupakan faktor krusial yang memengaruhi adopsi dan pemanfaatan platform e-partisipasi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan layanan *e-government*, termasuk platform

e-partisipasi. Penelitian Alshehri dan Drew (2023) menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara indeks sumber daya manusia dengan tingkat e-partisipasi di berbagai negara, di mana peningkatan investasi dalam pendidikan dan pelatihan digital berdampak langsung pada peningkatan partisipasi warga dalam platform digital pemerintah. Ketika warga negara memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi, hambatan teknis dalam berpartisipasi pada inisiatif *e-government* dapat diminimalisir.

Ditinjau dari *digital divide theory*, kesenjangan dalam sumber daya manusia menciptakan kesenjangan digital yang berdampak langsung pada tingkat e-partisipasi. Negara-negara dengan distribusi sumber daya manusia yang merata menunjukkan tingkat e-partisipasi yang lebih inklusif dan representatif. Studi longitudinal oleh Mahmood dan Weerakkody (2021) mengkonfirmasi bahwa program peningkatan literasi digital dan kemampuan TIK di masyarakat telah berhasil meningkatkan angka partisipasi warga dalam konsultasi kebijakan publik secara daring di beberapa negara berkembang. Mereka menekankan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan kuantitas partisipasi, tetapi juga kualitas kontribusi warga dalam platform e-partisipasi. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tingkat e-partisipasi, di mana semakin tinggi tingkat sumber daya manusia suatu negara, semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakatnya dalam platform digital pemerintah.

2.4.5 Pengaruh Suara dan Akuntabilitas (VOA) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)

Suara dan akuntabilitas, yang mencerminkan kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan akuntabilitas pemerintah kepada warganya, berperan fundamental dalam mendorong tingkat e-partisipasi. Dalam konteks negara dengan indeks suara dan akuntabilitas yang tinggi, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk melalui platform digital. Penelitian oleh Joshi dan Rosenfield (2023) menunjukkan korelasi positif yang kuat antara indeks suara dan akuntabilitas dengan tingkat e-partisipasi di berbagai negara. Mereka menemukan bahwa lingkungan politik yang menghargai keterbukaan dan memberikan jaminan bahwa suara warga akan didengar dan ditindaklanjuti menjadi katalisator penting bagi kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam platform *e-government*.

Berdasarkan perspektif *democratic governance theory*, suara dan akuntabilitas memperkuat kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara dalam ekosistem

digital. Studi longitudinal oleh Baum dan Martinez (2022) mengkonfirmasi bahwa negara yang mengalami peningkatan dalam indeks suara dan akuntabilitas juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam tingkat e-partisipasi, dengan pengaruh paling kuat terlihat pada dimensi *e-consultation* dan *e-decision making*. Mereka menyoroti bahwa ketika warga negara percaya bahwa kontribusi mereka dalam platform digital akan dipertimbangkan secara serius dan pemerintah bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, motivasi untuk berpartisipasi meningkat secara substansial. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis bahwa suara dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat e-partisipasi, di mana semakin tinggi tingkat kebebasan berekspresi dan akuntabilitas pemerintah suatu negara, semakin tinggi pula tingkat keterlibatan masyarakatnya dalam platform e-partisipasi.

2.4.6 Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi (TI) terhadap tingkat E-Partisipasi (EPT)

Infrastruktur telekomunikasi merupakan fondasi utama yang memungkinkan berjalannya platform e-partisipasi secara efektif. Ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan akses internet, jaringan telekomunikasi, dan perangkat digital menjadi prasyarat teknis bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam inisiatif e-partisipasi. Penelitian komprehensif oleh Rahman dan Chen (2022) menunjukkan bahwa negara dengan penetrasi internet yang tinggi dan biaya akses yang terjangkau memiliki tingkat e-partisipasi yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan negara dengan infrastruktur terbatas. Mereka menemukan bahwa peningkatan 10% dalam penetrasi *broadband* berkorelasi dengan peningkatan 7% dalam indeks e-partisipasi, menegaskan pentingnya konektivitas yang handal dan meluas sebagai *enabler* partisipasi digital warga.

Dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), infrastruktur telekomunikasi yang memadai meningkatkan *perceived ease of use* platform e-partisipasi, mengurangi hambatan teknis, dan memfasilitasi pengalaman pengguna yang lebih baik. Studi kasus oleh Nguyen dan Al-Saqaf (2021) di beberapa negara Asia Tenggara membuktikan bahwa investasi dalam infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah pedesaan, telah berhasil menjembatani kesenjangan digital dan memperluas jangkauan platform e-partisipasi kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Mereka mencatat bahwa aksesibilitas infrastruktur tidak hanya memengaruhi kuantitas partisipasi tetapi juga keberagaman suara dan perspektif yang terwakili dalam platform digital pemerintah. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis

bahwa infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif terhadap tingkat e-partisipasi, di mana semakin baik dan merata infrastruktur telekomunikasi suatu negara, semakin tinggi pula tingkat keterlibatan masyarakatnya dalam platform e-partisipasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif sebagai kerangka metodologis utama. Pendekatan ini merupakan metode ilmiah sistematis berbasis prinsip sains yang mengedepankan objektivitas dan pengukuran terstruktur. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan terhadap populasi atau sampel yang telah ditentukan secara spesifik, menggunakan instrumen penelitian yang tervalidasi, dan menganalisis data yang diperoleh dengan berpedoman pada kaidah-kaidah ilmiah yang konkret, empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan temuan yang dapat diverifikasi dan digeneralisasi, serta meminimalkan bias subjektif peneliti melalui prosedur pengumpulan dan analisis data yang terstandarisasi. Tujuan fundamental dari penerapan metode ini adalah untuk melakukan pengujian empiris terhadap hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid berdasarkan bukti statistik yang memadai (Sugiyono, 2013).

3.2 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif untuk menganalisis determinan e-partisipasi di negara-negara di benua Afrika. Penggunaan data sekunder dipilih untuk efisiensi waktu dan biaya, serta karena data tersebut sudah tersedia dan dapat diakses dari berbagai sumber. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. *UN E-Government Survey*:

Data mengenai indeks e-partisipasi diambil dari laporan *UN E-Government Survey* yang diterbitkan setiap dua tahun. Laporan ini mencakup ketersediaan alat e-partisipasi pada portal pemerintah nasional di 193 negara, dengan fokus khusus pada negara-negara Afrika, dari tahun 2010 hingga 2020.

2. *The Worldwide Governance Indicators (WGI)*:

Data terkait pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, serta suara dan akuntabilitas diambil dari WGI yang mencakup periode yang sama. Ini memberikan gambaran mengenai kualitas pemerintahan dan partisipasi masyarakat di negara-negara Afrika yang diteliti.

3. Data Statistik Resmi:

Data tambahan mengenai indikator sosial dan ekonomi, seperti tingkat pendidikan dan infrastruktur telekomunikasi, diambil dari badan statistik resmi masing-masing negara dan organisasi internasional seperti *African Development Bank* dan *World Bank*.

4. Literatur Terkait:

Penelitian ini juga mengandalkan buku, jurnal ilmiah, dan laporan sebelumnya yang membahas tentang e-partisipasi, kontrol korupsi, dan tata kelola pemerintahan di negara-negara Afrika untuk memperkuat analisis dan temuan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari negara-negara di benua Afrika yang menggunakan sistem e-partisipasi dalam pemerintahan. Penelitian ini memfokuskan pada analisis data yang terkait dengan e-partisipasi, pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, sumber daya manusia, serta infrastruktur telekomunikasi. Populasi pada penelitian ini adalah 193 negara.

3.1.2 Sampel

Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk memastikan representativitas. Data yang digunakan mencakup negara-negara yang memiliki tingkat e-partisipasi yang berbeda, khususnya Nigeria dan Kenya, yang memiliki perbedaan signifikan dalam pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintahan.

Berikut adalah kriteria pemilihan sampel:

- a. Data indeks e-partisipasi, sumber daya manusia dan infrastruktur telekomunikasi yang tersedia dari laporan *United Nations E-Government Survey*.
- b. Data pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, serta suara dan akuntabilitas dari *The Worldwide Governance Indicators* (WGI).

Berdasarkan kriteria ini, penelitian akan melibatkan beberapa negara di benua Afrika yang terdaftar dalam kedua sumber tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh data yang relevan untuk analisis lebih lanjut mengenai determinan e-partisipasi di negara-negara Afrika. Sample pada penelitian ini adalah 54 negara dari 193 negara.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat enam variabel utama yang akan dianalisis untuk memahami determinan e-partisipasi di negara-negara Afrika. Berikut adalah definisi operasional untuk masing-masing variabel

1. E-Partisipasi (EPT) (Y)

Definisi:

E-partisipasi adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Indikator:

Tingkat keterlibatan warga dalam platform digital untuk memberikan masukan terhadap kebijakan.

Frekuensi penggunaan aplikasi atau situs web pemerintah untuk partisipasi publik.

Persepsi masyarakat mengenai kemudahan akses dan penggunaan platform e-partisipasi.

2. Pengendalian korupsi (COC) (X_1)

Definisi:

Pengendalian Korupsi merujuk pada upaya dan mekanisme yang diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghukum tindakan korupsi dalam pemerintahan.

Indikator:

Indeks persepsi korupsi dari *Transparency International*.

Jumlah laporan dan kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah.

3. Hukum dan Peraturan (ROL) (X_2)

Definisi:

Hukum dan peraturan adalah prinsip di mana semua individu dan institusi, termasuk pemerintah, terikat oleh hukum yang berlaku.

Indikator:

Tingkat kepatuhan pemerintah terhadap hukum.

Akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan dan transparansi hukum.

4. Efektifitas Pemerintah (GEV) (X_3)

Definisi:

Efektifitas pemerintah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indikator:

Kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Tingkat responsivitas pemerintah terhadap keluhan dan kebutuhan warga.

Indeks efektivitas pemerintah dari *World Bank Governance Indicators*.

5. Suara dan akuntabilitas (VOA) (X_4)

Definisi:

Suara dan akuntabilitas adalah kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah.

Indikator:

Frekuensi partisipasi masyarakat dalam forum publik dan konsultasi.

Tingkat kebebasan berbicara dan berpendapat di negara tersebut.

Persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah terhadap tindakan dan kebijakan.

6. Sumber Daya Manusia (HUC) (X_5)

Definisi:

Sumber daya manusia merujuk pada kualitas dan keterampilan individu dalam masyarakat yang memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam e-partisipasi.

Indikator:

Tingkat pendidikan formal masyarakat.

Keterampilan digital yang dimiliki oleh individu.

Tingkat akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang relevan.

7. Infrastruktur telekomunikasi (TI) (X_6)

Definisi:

Infrastruktur telekomunikasi mencakup jaringan dan sistem yang mendukung akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Indikator:

Tingkat penetrasi internet di negara-negara yang diteliti.

Kualitas dan kecepatan layanan internet yang tersedia.

Aksesibilitas infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil.

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengukuran	Keterangan
1	Pengendalian Korupsi	<i>Corruption Perceptions Index (CPI)</i>	Dihitung berdasarkan survei dan penilaian dari berbagai sumber (misalnya, ahli, pebisnis) tentang persepsi korupsi di sektor publik. Nilai indeks berkisar dari -2,5 (kontrol korupsi rendah) hingga +2,5 (kontrol korupsi tinggi). Mencerminkan persepsi korupsi di sektor publik di negara tersebut. Sumber: <i>Worldwide Governance Indicators</i> .
2	Hukum dan Peraturan	<i>Rule of Law Index</i>	Dihitung dari penilaian tentang berbagai aspek hukum, termasuk perlindungan hak-hak individu, penegakan hukum, dan keadilan. Mengukur seberapa baik hukum ditegakkan dan apakah hukum melindungi hak-hak individu. Nilai berkisar dari -2,5 (sangat lemah) hingga +2,5 (sangat tinggi). Sumber: <i>Worldwide Governance Indicators</i> .
3	Efektivitas Pemerintah	<i>Governance Effectiveness Index (GEI)</i>	Dihitung berdasarkan data tentang kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Nilai berkisar dari -2,5 (rendah) hingga +2,5 (tinggi). Sumber: <i>Worldwide Governance Indicators</i> .
4	Suara dan Akuntabilitas	<i>Voice and Accountability Index (VAI)</i>	Dihitung menggunakan data tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan seberapa baik pemerintah mendengarkan suara masyarakat. Mengukur sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Nilai berkisar dari -2,5 (kebebasan rendah) hingga +2,5 (kebebasan tinggi). Sumber: <i>Worldwide Governance Indicators</i> .
5	Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dihitung berdasarkan rata-rata dari tiga indikator: harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita. Mengukur kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Nilai berkisar antara 0 dan 1. Sumber: <i>Human Development Reports</i> dari UNDP.
6	Infrastruktur Telekomunikasi	<i>Digital Economy and Society Index (DESI)</i>	Dihitung dari kombinasi data tentang konektivitas, keterampilan digital, penggunaan internet, dan layanan digital. Mengukur ketersediaan dan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan digital. Nilai berkisar antara 0 (rendah) hingga 1 (tinggi). Sumber: <i>European Commission</i> .

No	Variabel	Pengukuran	Keterangan
7	E-Partisipasi	<i>E-Participation Index (EPI)</i>	Dihitung berdasarkan penilaian tentang ketersediaan dan penggunaan platform digital oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat. Mengukur sejauh mana pemerintah menggunakan platform digital untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Nilai berkisar dari 0 (rendah) hingga 1 (tinggi). Sumber: <i>UN E-Government Survey</i> .

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang telah ditetapkan, metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk secara akurat mengidentifikasi hubungan antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Data panel, yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross-sectional*, memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika perubahan variabel dari waktu ke waktu dan antar unit yang berbeda.

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga model yang dapat diterapkan: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Pada tahap pengujian statistik, penelitian ini melakukan Uji Asumsi Klasik yaitu uji multikolinearitas dan heterokedastisitas serta menggunakan Uji Parsial (Uji T) untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen secara individual, Uji Serentak (Uji F) untuk mengevaluasi signifikansi model secara keseluruhan, dan Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur proporsi variansi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan pendekatan analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan akurat mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam konteks e-partisipasi di negara-negara Afrika.

3.5.1 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan metode yang efektif untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam konteks e-partisipasi di negara-negara Afrika. Dengan menggunakan data panel, peneliti dapat menganalisis perubahan dan dinamika yang terjadi seiring waktu, serta perbedaan antar negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan data lintas negara dengan data waktu, sehingga menghasilkan

pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi e-partisipasi. Selain itu, analisis ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana e-partisipasi dipengaruhi oleh pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, sumber daya manusia, serta infrastruktur telekomunikasi, yang merupakan variabel-variabel kunci dalam penelitian ini. Data panel merupakan gabungan dari data *Cross Section* dan *Time Series* maka persamaan regresinya menggunakan alat Stata 17. Model umum untuk analisis regresi panel dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : E-Partisipasi

X_{1it} : Pengendalian Korupsi

X_{2it} : Hukum dan Peraturan

X_{3it} : Efektivitas Pemerintah

X_{4it} : Suara dan Akuntabilitas

X_{5it} : Sumber Daya Manusia

X_{6it} : Infrastruktur Telekomunikasi

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6$: Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

Independent

ϵ_{it} : Error term

Untuk menentukan model yang paling sesuai dalam analisis ini, dilakukan pemilihan model terbaik yang mencakup tiga pendekatan sebagai berikut:

a. *Common Effect Model* (CEM):

CEM Ini adalah metode regresi yang memperkirakan data panel menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini tidak mempertimbangkan dimensi individu maupun waktu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku individu serupa di berbagai periode. Model ini tidak memperhitungkan perbedaan karakteristik dalam data cross-section maupun time series. Persamaan model ini dapat ditulis sebagaimana dijelaskan dalam Gujarati (2012) sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it}$$

b. *Fixed Effect Model* (FEM):

Model ini mengadopsi pendekatan di mana setiap subjek memiliki intersep yang berbeda, tetapi slope masing-masing subjek tetap konstan seiring waktu. Dengan kata lain, intersep bervariasi antara subjek, tetapi slope tetap sama. Model ini mengasumsikan adanya efek yang berbeda di antara individu, yang dapat diakomodasi melalui variasi pada intersep. Model yang diajukan oleh Gujarati (2012) adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \alpha_n D_n + \dots + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + D_i + \epsilon_{it}$$

c. *Random Effect Model* (REM):

Kuncoro (2012) menjelaskan bahwa pendekatan model efek acak ini digunakan ketika ada variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek, yang diasumsikan sebagai subjek acak. Pendekatan ini mengatasi kekurangan model efek tetap (*Fixed Effect*) dan memiliki ciri khas di mana jumlah *cross-section* lebih besar dari jumlah variabel penelitian. Dalam model ini, dimensi individu dan waktu juga dimasukkan, tetapi perbedaan dengan model efek tetap adalah bahwa error term diestimasi dengan mengaitkannya dengan dimensi individu. Persamaan model ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it}$$

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Pemilihan FEM didasarkan pada karakteristik data yang diperoleh serta tujuan analisis yang ingin dicapai. Metode ini sangat efektif ketika peneliti ingin mengontrol variabel yang tidak teramati, yang mungkin memengaruhi variabel dependen tetapi tidak dapat diukur secara langsung.

FEM memungkinkan untuk mengeksplorasi variasi dalam data dengan memperhitungkan perbedaan intersep di antara subjek (negara-negara di Afrika dalam konteks ini), sementara slope tetap konstan. Dengan demikian, model ini dapat menangkap efek spesifik individu yang mungkin ada, yang tidak dapat diakomodasi oleh model lain seperti *Common Effect Model*.

Penggunaan FEM sangat relevan dalam konteks e-partisipasi, karena ada banyak faktor yang dapat bervariasi di antara negara, seperti kebijakan pemerintah dan budaya politik, yang tidak dapat diukur tetapi tetap memiliki

pengaruh signifikan terhadap e-partisipasi. Dengan mengandalkan FEM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan representatif mengenai hubungan antara variabel independen dan e-partisipasi, sehingga membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang dinamika partisipasi digital di negara-negara Afrika. Berikut adalah persamaan model untuk *Fixed Effect Model* (FEM) yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + D_i + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} : Variabel dependen, yaitu tingkat e-partisipasi di negara i pada waktu t
- α : Konstanta (intersep) dari model
- X_{1it} : Pengendalian Korupsi di negara i pada waktu t
- X_{2it} : Hukum dan Peraturan di negara i pada waktu t
- X_{3it} : Efektivitas Pemerintah di negara i pada waktu t
- X_{4it} : Suara dan Akuntabilitas di negara i pada waktu t
- X_{5it} : Sumber Daya Manusia di negara i pada waktu t
- X_{6it} : Infrastruktur Telekomunikasi di negara i pada waktu t
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6$: Koefisien regresi untuk masing-masing variabel Independent
- D_i : Dummy variabel yang mewakili efek tetap untuk masing-masing individu (negara).
- ϵ_{it} : Error term yang mencerminkan variabel yang tidak terukur dan memengaruhi Y_{it}

3.5.2 Proses Pemilihan Model dalam Data Panel

Untuk menentukan model terbaik dari tiga metode estimasi pada data panel, digunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM sebagai berikut.

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model mana yang lebih tepat antara metode *Common Effect* dan *Fixed Effect* dalam analisis data panel. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect* (CE)

H_1 : Model *Fixed Effect* (FE)

Jika hasil Uji Chow menunjukkan probabilitas F lebih besar dari alpha 0,05, maka model yang lebih layak adalah *model Common Effect*. Sebaliknya, jika probabilitas F lebih kecil dari alpha 0,05, model yang lebih cocok adalah *model Fixed Effect*. Perhitungan statistik F dalam Uji Chow dapat dihitung dengan rumus berikut (Baltagi, 2005):

$$F = \frac{(SSE_1 - SSE_2)}{(n - 1)} \cdot \frac{SSE_2}{(nt - n - k)}$$

Keterangan:

SSE_1 : Jumlah Kuadrat Kesalahan dari model *Common Effect*

SSE_2 : Jumlah Kuadrat Kesalahan dari model *Fixed Effect*

n : Jumlah *Cross Section*

nt : Jumlah *Cross Section* x jumlah *time series*

k : Jumlah variabel independent

b. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk membandingkan model *Fixed Effect* dengan *Random Effect* untuk menentukan model terbaik yang digunakan dalam regresi data panel. Uji ini mengevaluasi hubungan antara galat model dengan satu atau lebih variabel penjelas. Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut (Baltagi, 2008). Statistik uji yang digunakan adalah uji *Chi-Squared* berdasarkan kriteria Wald, yang dinyatakan dengan rumus:

$$W = q' \cdot [var(q')]^{-1} \cdot \hat{q}$$

Keterangan :

$\hat{\beta}_{MET}$: Vektor estimasi slope model *Fixed Effect*

$\hat{\beta}_{MEA}$: ektor estimasi slope model *Random Effect*

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Model *Random Effect*

H1 : Model Fixed Effect

Jika hasil Uji Hausman menunjukkan probabilitas *Chi-Square* lebih kecil dari α 0,05, maka model yang lebih tepat adalah *model Fixed Effect*. Sebaliknya, jika probabilitas *Chi-Square* lebih besar dari α 0,05, model yang lebih sesuai adalah *model Random Effect*.

c. Uji LM Breusch-Pagan

Uji LM digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect* (CE) atau *Random Effect* (RE) untuk estimasi data panel dalam penelitian ini. Hipotesis dan kriteria dari Uji LM adalah sebagai berikut:

H0 : Model Common Effect (CE) lebih tepat.

H1 : Model Random Effect (RE) lebih tepat.

Kriteria Uji LM:

H0 ditolak jika nilai Breusch-Pagan $< 0,05$, sehingga *H1* diterima.

H0 diterima jika nilai Breusch-Pagan $> 0,05$, sehingga *H1* ditolak.

Penting untuk dicatat bahwa Uji LM tidak perlu dilakukan jika hasil dari Uji Chow sudah menentukan model terbaik antara *Common Effect* atau *Fixed Effect*, dan Uji Hausman sudah menentukan model terbaik antara *Random Effect* atau *Fixed Effect*, yang menghasilkan model terbaik yang konsisten.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik Data Panel

Dalam analisis data panel, pengujian asumsi klasik sangat penting untuk memastikan bahwa hasil dari model regresi yang digunakan adalah valid dan dapat diandalkan. Berikut adalah penjelasan mengenai lima asumsi konvensional yang umumnya diuji dalam data panel:

a. Multikolinearitas:

Istilah ini merujuk pada kondisi di mana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Situasi ini dapat menyebabkan peningkatan varians kesalahan dan kesulitan dalam mengestimasi koefisien. Untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas, dapat digunakan uji *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF untuk suatu variabel lebih besar dari 0,8, ini menunjukkan adanya multikolinearitas yang signifikan, dan peneliti mungkin perlu mempertimbangkan untuk menggabungkan atau menghapus variabel tersebut.

b. Heteroskedastisitas:

Istilah ini menggambarkan kondisi di mana varians dari nilai residual tidak konsisten di seluruh rentang nilai variabel independen. Hal ini dapat mengakibatkan estimasi koefisien yang tidak efisien dan kesalahan standar yang bias. Uji Breusch-Pagan dan uji White adalah dua metode umum yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Jika heteroskedastisitas teridentifikasi, peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan model regresi yang robust atau melakukan transformasi pada variabel untuk mengatasi masalah tersebut. Sebaliknya, jika tidak terdeteksi, maka heteroskedastisitas dianggap ada.

Dalam konteks pengujian heteroskedastisitas, hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis Nol (H_0): Tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi, yang berarti varians residual adalah konstan (homoskedastis). Dengan kata lain, kesalahan model tidak menunjukkan pola sistematis ketika diukur terhadap variabel independen.

Hipotesis Alternatif (H_a): Terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi, yang menunjukkan bahwa varians dari nilai residual tidak konstan. Ini berarti kesalahan model menunjukkan pola sistematis dan variansnya bervariasi tergantung pada nilai variabel independen.

Kriteria pengambilan keputusan didefinisikan sebagai berikut:

Jika nilai signifikan $< \alpha$ 0,05, maka H_0 tidak diterima atau ditolak.

Jika nilai signifikan $> \alpha$ 0,05, maka H_0 diterima atau gagal ditolak.

3.5.4 Uji Signifikansi

a. Uji t (*T-Statistic*)

Uji T-Statistic digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini, jika t hitung berada di wilayah penerimaan H_0 (t tabel $< t$ hitung $< t$ tabel), maka variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga H_0 diterima. Sebaliknya, jika t hitung berada di luar wilayah penerimaan H_0 (t hitung $< t$ tabel atau t hitung $> t$ tabel), maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dan H_0 ditolak. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ (α), berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga H_0

diterima. Namun, jika nilai probabilitas $< 0,05$ (α), berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga H_0 ditolak.

b. Uji *F-Statistic*

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh bersama dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kriteria signifikansi 0,05, nilai Prob F-statistik dibandingkan dengan α (0,05 atau 5%). Kriteria yang diterima adalah sebagai berikut:

Jika Prob F-statistik $< \alpha$, maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersamaan memengaruhi variabel dependen.

Jika Prob F-statistik $> \alpha$, maka variabel independen secara bersamaan tidak memengaruhi variabel dependen.

c. Uji *Koefisien Determinasi* (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran yang memberikan informasi mengenai seberapa baik model regresi sesuai dengan data yang ada. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar R^2 , semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil R^2 , semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan e-partisipasi di negara-negara benua Afrika dengan fokus pada beberapa variabel, yaitu pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, sumber daya manusia, serta infrastruktur telekomunikasi. Data yang digunakan mencakup 54 negara dari total 193 negara yang terdaftar, dengan informasi yang diambil dari berbagai sumber, termasuk *UN E-Government Survey* dan *The Worldwide Governance Indicators (WGI)*.

4.2 Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif

Keterangan	COC	ROL	GEV	VOA	HUC	TI	EPT
Mean	-0,6500926	-1,026235	-2,895741	-1,935636	0,4195111	0,2189809	0,2567602
Minimum	-1,92	-102	-127	-422	0	0	0
Maximum	1,42	0,95	1,16	0,97	0,894	0,993	0,98
Std. Dev.	0,6473607	5,662538	14,48887	23,42129	0,1947983	0,2084941	0,2301911
Observation	324	324	324	324	324	324	324

Sumber : Hasil olah data stata 17

Pada tabel 4.1 jumlah hasil observasi 324 dari 54 negara di Afrika dijelaskan analisis dari hasil olah data statistik deskriptif pada variabel independen Pengendalian Korupsi (COC) mempunyai nilai minimum -1,92 yang diperoleh negara South Sudan pada tahun 2020 dan nilai maksimum 1,42 yang diperoleh negara Seychelles pada tahun 2020. Nilai rata-rata pengendalian korupsi (COC) pada periode 2010-2020 menunjukkan angka - 0,6500926 dan standar deviasinya sebesar 0,6473607.

Hukum dan Peraturan (ROL) mempunyai nilai minimum -102 yang diperoleh negara Mauritius pada tahun 2012 dan nilai maksimum 0,95 yang diperoleh negara Mauritius pada tahun 2014. Nilai rata-rata hukum dan peraturan pada periode 2010-2020 adalah -1,026235 dan standar deviasinya sebesar 5,662538.

Efektivitas Pemerintah (GEV) memiliki nilai minimum -127 yang diperoleh negara Libya pada tahun 2012 dan nilai maksimum 1,16 yang diperoleh negara Mauritius pada tahun 2014. Nilai rata-rata efektivitas pemerintah pada periode 2010-

2020 adalah -2,895741 dan nilai standar deviasinya sebesar 14,48887, yang menunjukkan bahwa nilai efektivitas pemerintah sangat bervariasi antar negara dan waktu.

Suara dan Akuntabilitas (VOA) mempunyai nilai minimum -422 yang diperoleh negara Comoros pada tahun 2010 dan nilai maksimum 0,97 yang diperoleh negara Cabo Verde 2016. Nilai rata-rata suara dan akuntabilitas pada periode 2010-2020 sebesar -1,935636 dan standar deviasinya adalah 23,42129, hal ini menunjukkan adanya variasi yang tinggi dalam tingkat suara dan akuntabilitas antar negara selama periode penelitian.

Sumber Daya Manusia (HUC) memiliki nilai minimum 0 yang diperoleh beberapa negara yaitu Cabo Verde, Eswantini, Sierra Leone, Somalia dan South Sudan sedangkan nilai maksimum 0,894 yang diperoleh negara Niger 2018. Nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 0,4195111 dan standar deviasinya adalah 0,1947983, yang mengindikasikan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia di berbagai negara yang telah diamati.

Infrastruktur Telekomunikasi (TI) mempunyai nilai minimum 0 yang diperoleh dari beberapa negara seperti Cabo verde, Eritrea dan Mali kemudian nilai maksimum 993 yang diperoleh negara Marocco pada tahun 2016. Nilai rata-rata pada infrastruktur telekomunikasi adalah 0,2189809 dan standar deviasinya sebesar 0,2084941, yang menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar antar negara dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi.

Variabel E-Partisipasi (EPT) menghasilkan nilai minimum 0 yang diperoleh dari beberapa negara yaitu Burundi, Cabo Verde, Central Africa Republic, Comoros, Djibouti, Eritrea, Eswantini, Gambia, Guinea, Libya, Malawi, Mali, Mauritius, Niger, Somalia dan South Sudan sedangkan nilai maksimumnya 0,98 yang diperoleh negara Cabo Verde, Congo, Sierra Leone, Togo. Nilai rata-rata yang dimiliki e-partisipasi sebesar 0,2567602 dan nilai standar deviasinya adalah 0,2301911, yang menunjukkan adanya penerapan e-partisipasi antar negara pada tingkat variasi yang cukup besar.

4.3 Hasil Regresi Data Panel

Penelitian ekonometrika membutuhkan pendekatan yang tepat dalam menganalisis hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Dalam konteks penelitian lintas wilayah dan waktu, regresi data panel menjadi metode yang sangat relevan karena kemampuannya mengkombinasikan dimensi *cross-section* dan *time series*. Penelitian di wilayah Benua

Afrika ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *E-Participation* (EPT) dengan mengidentifikasi pengaruh tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, dan infrastruktur telekomunikasi. Melalui serangkaian pengujian pemilihan model dan uji statistik, diperoleh persamaan regresi data panel yang mampu menjelaskan fenomena *E-Participation* di Afrika dan mekanisme pengaruh berbagai variabel independen terhadapnya.

Dalam penelitian ini, model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman. Dalam penelitian ini, hasil uji Chow diperoleh nilai F sebesar 1,52 dengan probabilitas F sebesar 0,0184. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas $< 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini berarti model yang lebih tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan efek individu yang signifikan antar negara di Afrika yang diteliti. Dengan kata lain, setiap negara memiliki karakteristik unik yang perlu diperhitungkan dalam model. Setelah Uji Chow menunjukkan bahwa FEM lebih baik daripada CEM, langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk memilih antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Dalam penelitian ini, hasil uji Hausman diperoleh nilai Wald $\chi^2(6)$ sebesar 97,14 dan probabilitas sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa nilai probabilitas $< 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini berarti model yang lebih tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa terdapat korelasi antara efek individu dengan variabel independen. Dalam konteks ini, FEM lebih tepat karena mampu mengontrol variable *omitted* yang dapat berubah antar individu tetapi konstan sepanjang waktu. Persamaan regresi data panel yang dihasilkan adalah:

$$Y = 0,1006511 + 0,0869764 X^1 + 0,002362 X^2 + 0,002405 X^3 - 0,0001092 X^4 + 0,4267423 X^5 + 0,1954763 X_6$$

Dimana:

Y = E-Participation (EPT)

X_1 = Pengendalian Korupsi (COC)

X_2 = Hukum dan Peraturan (ROL)

X_3 = Efektivitas Pemerintah (GEV)

X_4 = Suara dan Akuntabilitas (VOA)

X_5 = Sumber Daya Manusia (HUC)

X_6 = Infrastruktur Telekomunikasi (TI)

Tabel 4.2 Hasil Regresi Fixed effect model (FEM)

Y	Coef	Std.Err.	t	P > t
COC	0,0869764	0,0723429	1,20	0,230
ROL	0,002362	0,0022546	1,05	0,296
GEV	0,002405	0,0008898	2,70	0,007
VOA	-0,0001092	0,000506	-0,22	0,829
HUC	0,4267423	0,0788422	5,41	0,000
TI	0,1954763	0,0620103	3,15	0,002
Cons	0,1006511	0,0559832	1,80	0,073
Adj R-Squared	0,2348		F-Statistic	11,68
Prob (F-Statistic)			0,0000	

Sumber : Hasil olah data stata 17

Nilai konstanta sebesar 0,1006511 mengindikasikan bahwa jika semua variabel independen (COC, ROL, GEV, VOA, HUC, dan TI) bernilai nol, maka *E-Participation* (EPT) di negara-negara Afrika memiliki nilai dasar sebesar 10,06511%. Interpretasi ini bersifat matematis dan mungkin tidak memiliki makna praktis yang substantif, mengingat kecil kemungkinan semua variabel independen bernilai nol secara bersamaan. Namun, nilai konstanta ini menunjukkan adanya tingkat partisipasi elektronik minimal yang mungkin terjadi bahkan ketika faktor-faktor yang dipelajari tidak berperan.

1. Koefisien Pengendalian Korupsi (COC)

Koefisien variabel Pengendalian Korupsi (X_1) sebesar 0,0869764 menunjukkan hubungan positif antara kontrol korupsi dengan tingkat partisipasi elektronik. Secara spesifik, ketika kontrol korupsi meningkat sebesar 1% (dengan asumsi variabel lain konstan), tingkat E-Partisipasi akan meningkat sebesar 8,69764%. Sebaliknya, jika kontrol korupsi menurun sebesar 1%, maka E-Partisipasi akan menurun sebesar 8,69764%.

2. Koefisien Hukum dan Peraturan (ROL)

Koefisien variabel Hukum dan Peraturan (X_2) sebesar 0,002362 mengindikasikan hubungan positif antara hukum dan peraturan dengan E-Partisipasi. Ketika indikator Hukum dan Peraturan meningkat sebesar 1% (dengan asumsi variabel lain konstan), E-Partisipasi akan meningkat sebesar 0,2362%. Sebaliknya, jika hukum dan peraturan menurun sebesar 1%, maka E-Partisipasi akan menurun sebesar 0,2362%.

3. Koefisien Efektivitas Pemerintah (GEV)

Koefisien variabel Efektivitas Pemerintah (X_3) sebesar 0,002405 menunjukkan hubungan positif antara efektivitas pemerintah dengan E-Partisipasi. Ketika efektivitas pemerintah meningkat sebesar 1% (dengan asumsi variabel lain konstan),

E-Partisipasi akan meningkat sebesar 0,2405%. Sebaliknya, jika efektivitas pemerintah menurun sebesar 1%, maka E-Partisipasi akan menurun sebesar 0,2405%.

4. Koefisien Suara dan Akuntabilitas (VOA)

Koefisien variabel Suara dan Akuntabilitas (X_4) sebesar -0,0001092 mengindikasikan hubungan negatif yang sangat kecil antara tingkat partisipasi dan akuntabilitas dengan E-Partisipasi. Ketika suara dan akuntabilitas meningkat sebesar 1% (dengan asumsi variabel lain konstan), E-Partisipasi akan menurun sebesar 0,01092%. Sebaliknya, jika SA menurun sebesar 1%, maka E-Partisipasi akan meningkat sebesar 0,01092%.

5. Koefisien Sumber Daya Manusia (HUC)

Koefisien variabel Sumber Daya Manusia (X_5) sebesar 0,4267423 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara sumber daya manusia dengan E-Partisipasi. Ketika indikator Sumber Daya manusia meningkat sebesar 1% (dengan asumsi variabel lain konstan), E-Partisipasi akan meningkat secara signifikan sebesar 42,67423%. Sebaliknya, jika sumber daya manusia menurun sebesar 1%, maka E-Partisipasi akan menurun sebesar 42,67423%.

6. Koefisien Infrastruktur Telekomunikasi (TI)

Koefisien variabel Infrastruktur Telekomunikasi (X_6) sebesar 0,1954763 menunjukkan hubungan positif antara infrastruktur telekomunikasi dengan E-Partisipasi. Ketika infrastruktur telekomunikasi meningkat sebesar 1% (dengan asumsi variabel lain konstan), E-Partisipasi akan meningkat sebesar 19,54763%. Sebaliknya, jika infrastruktur telekomunikasi menurun sebesar 1%, maka E-Partisipasi akan menurun sebesar 19,54763%.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Model yang terpilih adalah FEM, maka uji asumsi klasik yang digunakan adalah Multikolinearitas sebagai berikut.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

	COC	ROL	GEV	VOA	HUC	TI
COC	1,0000					
ROL	0,0205	1,0000				
GEV	0,0601	0,3983	1,0000			
VOA	0,0350	-0,0003	-0,0043	1,0000		
HUC	0,2011	-0,0664	-0,0853	0,0650	1,0000	
TI	0,1790	-0,0067	0,0482	0,0588	0,3720	1,0000

Sumber : Hasil olah data stata 17

Tabel 4.3 menampilkan matriks korelasi antar enam variabel (COC, ROL, GEV, VOA, HUC, dan TI) yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan linear yang kuat di antara variabel independen dalam model statistik. Nilai 1,0000 pada diagonal tabel menunjukkan korelasi sempurna dari setiap variabel dengan dirinya sendiri, sementara nilai-nilai lainnya menunjukkan korelasi antar variabel yang berbeda. Hasil uji ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius dalam model, karena nilai korelasi tertinggi hanya mencapai 0,3983 (antara ROL dan GEV) dan 0,3720 (antara HUC dan TI), jauh di bawah ambang batas kritis multikolinearitas yang umumnya ditetapkan pada nilai 0,8 atau 0,9, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam model ini cukup terpisah dan mengukur aspek yang berbeda.

4.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji T (Uji Signifikansi)

Uji signifikansi t digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.

- a. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Korupsi (COC) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap EPT (nilai t hitung = 1,20 < t tabel = 1,967359 dan nilai sig. = 0,230 > 0,05). Ini mengindikasikan bahwa di negara-negara Afrika, kontrol korupsi belum menjadi faktor determinan yang signifikan untuk partisipasi elektronik.
- b. Hasil uji t menunjukkan bahwa Hukum dan Peraturan (ROL) tidak berpengaruh signifikan terhadap EPT (nilai t hitung = 1,05 < t tabel = 1,967359 dan nilai sig. = 0,296 > 0,05). Ini menunjukkan bahwa pengaruh supremasi hukum terhadap partisipasi elektronik belum kuat secara statistik di negara-negara Afrika.
- c. Hasil uji t menunjukkan bahwa Efektivitas Pemerintah (GEV) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap EPT (nilai t hitung = 2,70 > t tabel = 1,967359 dan nilai sig. = 0,007 < 0,05). Ini menunjukkan bahwa meskipun hubungannya negatif, efektivitas pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi elektronik di Afrika.
- d. Koefisien Suara dan Akuntabilitas (VOA) yang sangat kecil menunjukkan bahwa perubahan dalam suara dan akuntabilitas memiliki dampak minimal terhadap partisipasi elektronik di Afrika. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil uji t yang menunjukkan bahwa suara dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan

terhadap EPT (nilai t hitung = $-0,22 < t$ tabel = $1,967359$ dan nilai sig. = $0,829 > 0,05$).

- e. Hasil uji t menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (HUC) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap EPT (nilai t hitung = $5,41 > t$ tabel = $1,967359$ dan nilai sig. = $0,000 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor determinan yang sangat penting dalam menentukan tingkat partisipasi elektronik di Afrika.
- f. Hasil uji t menunjukkan bahwa Telekomunikasi Infrastruktur (TI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap EPT (nilai t hitung = $3,15 > t$ tabel = $1,967359$ dan nilai sig. = $0,002 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat partisipasi elektronik di Afrika.

2. Uji F (Kelayakan Model)

Uji F merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar $11,68$ yang lebih besar dari F tabel yaitu $2,127219$, dengan nilai signifikansi $0,0000$ yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi $0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a), yang berarti bahwa secara bersama-sama atau simultan, seluruh variabel independen yaitu Pengendalian Korupsi (COC), Hukum dan Peraturan (ROL), Efektivitas Pemerintah (GEV), Suara dan Akuntabilitas (VOA), Sumber Daya Manusia (HUC), dan Infrastruktur Telekomunikasi (TI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap E-Participation (EPT) di negara-negara Afrika.

3. Koefisien Determinasi (*R-squared*)

Koefisien Determinasi (*R-squared*) pada hasil analisis regresi menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Berdasarkan data yang disajikan, nilai adjusted R Square adalah $0,2348$ atau $23,48\%$. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam model penelitian yang terdiri dari Pengendalian Korupsi (COC), Hukum dan Peraturan (ROL), Efektivitas Pemerintah (GEV), Suara dan Akuntabilitas (VOA), Sumber Daya Manusia (HUC), dan Infrastruktur Telekomunikasi (TI) secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan $23,48\%$ dari variasi yang terjadi pada variabel dependen EPT (*Economic Performance and Trade*). Sementara itu, sebagian besar variasi yaitu sebesar $76,52\%$ dijelaskan

oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai R-squared yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang terbatas dan masih ada banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap EPT yang belum tercakup dalam model.

4.6 Pembahasan

4.4.1. Analisis Pengendalian Korupsi terhadap E-partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian korupsi memiliki hubungan positif terhadap e-partisipasi, meskipun tidak signifikan secara statistik. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat ketika ada upaya pengendalian korupsi yang efektif. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah berupaya mengurangi korupsi, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan melalui saluran elektronik.

Di sisi lain, pengendalian korupsi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Mkhize et al. (2024) bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci dalam menciptakan ruang bagi partisipasi publik. Namun, fakta bahwa hubungan ini tidak signifikan menunjukkan bahwa di Afrika, pengendalian korupsi belum menjadi faktor determinan utama yang mendorong e-partisipasi.

4.4.2. Hukum dan Peraturan dalam E-Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan peraturan memiliki dampak positif terhadap e-partisipasi, meskipun tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik dapat menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk partisipasi, namun belum menjadi faktor pendorong utama. Teori Dworkin (2024) tentang keadilan dan transparansi dalam hukum menjelaskan bahwa hukum harus memberikan jaminan bagi masyarakat untuk berpartisipasi tanpa takut akan represalias. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penerapan hukum yang ketat dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Rachmad et al. (2023) menekankan bahwa sistem hukum yang kuat dan efektif dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat. Jadi, meskipun hubungan positif antara hukum dan peraturan dengan e-partisipasi tidak

signifikan, tetap penting bagi pemerintah untuk menyederhanakan proses regulasi agar masyarakat merasa lebih mudah untuk terlibat. Dengan demikian, peneliti harus memperhatikan bahwa keberadaan hukum yang baik perlu diimplementasikan dengan mempertimbangkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi masyarakat.

4.4.3. Efektivitas Pemerintah dan E-Partisipasi

Efektivitas pemerintah menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan e-partisipasi, di mana peningkatan efektivitas diikuti oleh peningkatan tingkat partisipasi. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi ketika mereka percaya pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Teori Osborne dan Gaebler (1992) menekankan pentingnya inovasi dan responsivitas dalam pelayanan publik, yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkat ketika pemerintah dianggap efektif. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi secara elektronik.

Lebih lanjut, Meyer dan Rowan (1977) menyatakan bahwa legitimasi institusi pemerintahan sangat berpengaruh terhadap efektivitasnya. Ketika pemerintah berhasil menciptakan legitimasi melalui partisipasi masyarakat, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk fokus pada efektivitas layanan dan untuk menggandeng masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa bahwa suara mereka dihargai dan diakui.

4.4.4. Suara dan Akuntabilitas dalam E-Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suara dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang sangat kecil dan negatif terhadap e-partisipasi. Hal ini mencerminkan bahwa ketika akuntabilitas pemerintah rendah, masyarakat cenderung merasa tidak terlibat dan apatis. Sen (1999) berpendapat bahwa suara masyarakat adalah elemen dasar dari demokrasi, di mana partisipasi publik meningkatkan legitimasi pemerintah. Ketika masyarakat tidak merasa bahwa suara mereka didengar, mereka akan enggan untuk terlibat dalam proses e-partisipasi. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat agar masyarakat merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan umpan balik terhadap kebijakan yang diambil.

Penelitian oleh Wardana et al. (2024) juga mendukung pentingnya akuntabilitas dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah, mereka akan lebih termotivasi untuk

berpartisipasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan e-partisipasi, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme akuntabilitas berfungsi secara efektif, sehingga masyarakat merasa percaya diri untuk terlibat dan menyuarakan pendapat mereka.

4.4.5. Sumber Daya Manusia dan E-Partisipasi

Sumber Daya manusia menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap e-partisipasi, di mana peningkatan dalam kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat berhubungan langsung dengan peningkatan partisipasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen (1999) yang menekankan pentingnya pendekatan kapabilitas dalam pembangunan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki akses yang baik terhadap pendidikan dan pelatihan lebih mampu memanfaatkan teknologi untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan menjadi kunci untuk mendorong e-partisipasi di negara-negara Afrika.

Lebih lanjut, penelitian oleh Khunaivi et al. (2023) menyoroti bahwa pembangunan manusia harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketika masyarakat memiliki keterampilan yang memadai, mereka akan lebih percaya diri untuk menggunakan platform digital dalam berkontribusi pada proses pemerintahan. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berkontribusi pada peningkatan e-partisipasi, tetapi juga memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik di negara-negara Afrika.

4.4.6. Infrastruktur Telekomunikasi dan E-Partisipasi

Infrastruktur telekomunikasi menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan e-partisipasi, di mana peningkatan infrastruktur ini diikuti oleh peningkatan partisipasi. Temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik merupakan prasyarat penting untuk mendukung partisipasi digital, dan ketika dikombinasikan dengan pendidikan dan kesadaran yang cukup, masyarakat akan memanfaatkan akses tersebut. Castells (2000) menjelaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi berfungsi sebagai jaringan komunikasi yang esensial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, akses terhadap platform e-partisipasi menjadi lebih mudah, sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat partisipasi.

Lebih lanjut, Friedman (2005) menekankan bahwa infrastruktur telekomunikasi juga berfungsi sebagai pendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan infrastruktur yang tersedia,

maka potensi pertumbuhan partisipasi digital akan meningkat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur, sambil juga menciptakan program pendidikan dan kesadaran yang mendorong masyarakat untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam partisipasi publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang determinan e-partisipasi di negara-negara Benua Afrika, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Model Regresi Data Panel: Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik untuk menganalisis determinan e-partisipasi di Afrika, berdasarkan uji Chow dan uji Hausman. Hal ini mengindikasikan adanya karakteristik unik pada masing-masing negara di Afrika yang memengaruhi tingkat e-partisipasi.
2. Pengaruh Variabel Secara Simultan: Secara simultan, seluruh variabel independen (Pengendalian Korupsi, Hukum dan Peraturan, Efektivitas Pemerintah, Suara dan Akuntabilitas, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Telekomunikasi) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *E-Participation* (EPT) di negara-negara Afrika, ditunjukkan dengan nilai F hitung (11,68) yang lebih besar dari F tabel (2,127219) dan nilai signifikansi 0,0000.
3. Pengaruh Variabel Secara Parsial:
 - a. Efektivitas Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap e-partisipasi, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan publik dan implementasi kebijakan yang efektif mendorong partisipasi elektronik masyarakat.
 - b. Sumber Daya Manusia menunjukkan pengaruh positif yang kuat dan signifikan terhadap e-partisipasi, menegaskan pentingnya pendidikan dan pengembangan keterampilan dalam mendorong partisipasi digital.
 - c. Infrastruktur Telekomunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap e-partisipasi, menunjukkan bahwa ketersediaan akses teknologi merupakan faktor penting dalam mendukung partisipasi elektronik.
 - d. Pengendalian Korupsi menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan terhadap e-partisipasi, mengindikasikan bahwa upaya anti-korupsi belum menjadi faktor determinan utama bagi partisipasi elektronik di Afrika.
 - e. Hukum dan Peraturan memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap e-partisipasi, menunjukkan bahwa kerangka hukum belum menjadi pendorong utama partisipasi elektronik.

- f. Suara dan Akuntabilitas menunjukkan hubungan negatif yang sangat kecil dan tidak signifikan, mencerminkan bahwa di Afrika, mekanisme akuntabilitas belum berperan efektif dalam mendorong e-partisipasi.
4. Koefisien Determinasi: Nilai adjusted R-squared sebesar 0,2348 menunjukkan bahwa variabel independen dalam model hanya mampu menjelaskan 23,48% dari variasi e-partisipasi, sedangkan 76,52% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap e-partisipasi di Afrika yang belum tercakup dalam penelitian ini.
5. Faktor Determinan Utama: Sumber daya manusia dan infrastruktur telekomunikasi merupakan faktor determinan yang paling signifikan dalam mendorong e-partisipasi di negara-negara Afrika, diikuti oleh efektivitas pemerintah. Temuan ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, pengembangan keterampilan, dan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan partisipasi elektronik.

5.2 Implikasi

1. Pengembangan SDM: Temuan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan faktor determinan paling signifikan mengimplikasikan perlunya fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan digital sebagai strategi utama meningkatkan e-partisipasi di Afrika.
2. Prioritas Infrastruktur: Signifikansi Infrastruktur Telekomunikasi mengimplikasikan bahwa pengembangan dan perluasan akses teknologi informasi dan komunikasi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan inisiatif e-partisipasi.
3. Reformasi Birokrasi: Pengaruh positif dari Efektivitas Pemerintah mengimplikasikan bahwa peningkatan kualitas layanan publik dan implementasi kebijakan yang efektif akan berdampak langsung pada tingkat partisipasi elektronik masyarakat.
4. Pendekatan Tata Kelola: Tidak signifikannya pengaruh Pengendalian Korupsi, Hukum dan Peraturan, serta Suara dan Akuntabilitas mengimplikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam mengembangkan kerangka tata kelola e-government di Afrika.
5. Faktor Kontekstual: Nilai R-squared yang relatif rendah (23,48%) mengimplikasikan pentingnya eksplorasi terhadap faktor-faktor lain seperti budaya, kepercayaan publik, dan dinamika sosial-politik yang mungkin memiliki pengaruh substansial terhadap adopsi platform e-partisipasi.

5.3 Saran

1. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan faktor budaya dan kepercayaan publik sebagai variabel baru untuk memahami lebih dalam determinan e-partisipasi. Pendekatan kualitatif juga dapat digunakan untuk melengkapi hasil kuantitatif dengan wawasan langsung dari masyarakat dan pemerintah mengenai hambatan dan peluang dalam e-partisipasi. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara negara-negara Afrika dengan kawasan lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam implementasi e-partisipasi. Analisis longitudinal dengan rentang waktu yang lebih panjang juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan e-partisipasi seiring dengan perubahan teknologi dan kebijakan. Penelitian selanjutnya juga perlu mempertimbangkan segmentasi regional untuk mengidentifikasi karakteristik unik dari masing-masing wilayah di Afrika.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya e-partisipasi dengan lebih aktif memanfaatkan platform digital yang disediakan pemerintah. Literasi digital dan pemahaman tentang kebijakan publik juga perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat lebih efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pembentukan komunitas digital di tingkat lokal dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat keterlibatan kolektif dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat juga perlu mengadvokasi akses yang lebih luas terhadap infrastruktur telekomunikasi dan internet yang terjangkau, serta berperan aktif dalam mengawasi implementasi kebijakan *e-government* untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan.

3. Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam e-governance dengan memastikan bahwa platform digital yang ada mudah diakses, responsif, dan transparan. Selain itu, edukasi serta peningkatan kapasitas SDM dalam birokrasi digital perlu diperkuat agar implementasi e-partisipasi lebih inklusif dan efektif di seluruh lapisan masyarakat. Mengingat sumber daya manusia dan infrastruktur telekomunikasi merupakan faktor determinan utama e-partisipasi, pemerintah perlu memprioritaskan investasi dalam pendidikan, pengembangan keterampilan digital, dan perluasan infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah terpencil. Upaya peningkatan efektivitas pemerintah juga perlu dilakukan melalui

reformasi birokrasi dan penguatan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan masyarakat memantau kinerja pemerintah. Meskipun pengendalian korupsi tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam penelitian ini, penguatan upaya anti-korupsi tetap penting untuk membangun kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kerjasama regional dalam berbagi pengalaman dan sumber daya untuk pengembangan *e-government* yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyeye, M. O., & Fagbemi, T. O. (2021). Fighting corruption through e-governance: A case study of anti-corruption initiatives in selected African countries. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 8(3), 1-17.
- Adnan, M., Ghazali, M., & Othman, N. Z. S. (2022). E-participation within the context of e-government initiatives: A comprehensive systematic review. In *Telematics and Informatics Reports* (Vol. 8). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.teler.2022.100015>
- African Development Bank. (2023). Study on e-participation initiatives in Africa. *African Development Bank*.
- African Union. (2020). Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030). *African Union*.
- Akomea-Frimpong, I., Andoh, C., & Ofosu-Hene, E. D. (2020). Control of corruption, e-government adoption, and financial development in Sub-Saharan Africa. *Information Technology for Development*, 26(4), 726-748.
- Alshehri, M., & Drew, S. (2023). The impact of human capital on e-participation: A cross-national analysis. *Government Information Quarterly*, 40(2), 101-115.
- Amartya, S. (1999). *Development as Freedom*. New York: Knopf.
- Arakpogun, E. O., Whalley, J., Wanjiru, R., Elsahn, Z., & Kummitha, R. K. R. (2023). Bridging the Digital Divide in Africa via Universal Service Funds: An Institutional Theory Perspective. *Information Technology and People*, 36(8), 126–154. <https://doi.org/10.1108/ITP-01-2023-0042>
- Ayu Puji Laksmi Dewi, P., & Mariadi, Y. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan. In *Valid Jurnal Ilmiah* (Vol. 19, Issue 1).
- Bardhan, Pranab. 1997 Corruption and Development: A Review of Issues. *Journal of Economic Literature*, Vol. 35, No. 3 : 1320-1346.
- Baum, C., & Martinez, D. (2022). Voice, accountability and e-participation: A longitudinal study of democratic development in the digital age. *Telecommunications Policy*, 46(4), 102-118.
- Bertot, J. C. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264-271.
- Botero-Rodríguez, F., Pantoja-Ruiz, C., & Rosselli, D. (2022). Corruption and its relation to prevalence and death due to noncommunicable diseases and risk factors: a global perspective. *Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health*, 46. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.10>
- Bovens, M. 2007. “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework”. *European Law Journal*. Vol. 13.

- Castells, M. (2000). *The Rise of The Network Society*. Victoria, Australia: Blackwell Publishing.
- Dharmajaya, M. A., Ikhwan, M. I. N., Syahiddinillah, F., & Harmonis, H. (2024). Implikasi Ekonomi UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Ekosistem Komunikasi Digital. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 23(1), 132–141. <https://doi.org/10.32509/wacana.v23i1.3643>
- Efendi, S. (2024). Prinsip Keadilan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v1i2.3427>
- Ekoprodjo, H. S., & Wibowo, M. (2024). Peran Gereja Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Korelasi Dengan Mikha 7:3. *In Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* (Vol. 5, Issue 2).
- Falah, S., Waromi, J., & Sulistiawan, S. (2024). Peraturan pemerintah, mekanisme akuntabilitas sosial, dan tata kelola: kajian terhadap pemerintah kampung perbatasan. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 220. <https://doi.org/10.29210/020244393>
- Farhani, A., & Fachri Adnan, M. (2021). Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Sistem Paduko. *JESS*, 5(1), 66–79. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1>
- Fikri Ardiansyah. (2024). Pencegahan Tindak Korupsi di dalam Lingkungan Perkantoran. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 293–305. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.256>
- Fitri, A. (2021). Kajian Delapan Standar Nasional Penelitian yang harus di Perguruan Tinggi. *Adiba: Journal of Education*, 1, 88–96. <https://www.maxmanroe.com>
- Friedman, T. L. (2005). *Its a Flat World, After All*. New York Times, 1–10.
- Gajali, A. (2023). Upaya UNESCO untuk Meningkatkan Pendidikan di Afrika. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/akhmadghazali08/upaya-unesco-untuk-meningkatkan-pendidikan-di-afrika-20px3TbT4d1/2>
- Gajali, Ahmaddinur. (2023). Upaya UNESCO untuk Meningkatkan Pendidikan di Afrika. *Kumparan.com*.
- Ghanem, H. (2018). *The Human Capital Project in Africa: Stories of Progress*.
- Graham, S., & Marvin, S. 2001. *Splintering Urbanism*. London: Routledge.
- Haq, Mahbub ul. 1995. *Reflections on Human Development*. New York : Oxford University Press.
- Heeks, R. 2002. “Failure, Success, and Improvisation of Information Systems Projects in Developing Countries.” *Development Informatics, Working Paper Series*, No. 11, Retrieved 10 March 2009, from http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/di_wp11.htm

- Hidayati, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang: Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 224–241. <https://doi.org/10.23920/Jbmh.V3n2.18>
- <https://kumparan.com/akhmadghazali08/upaya-unesco-untuk-meningkatkan-pendidikan-di-afrika-20px3TbT4d1/2>
- Ifinedo, P., Anwar, A., & Cho, D. (2021). Using panel data analysis to uncover drivers of e-participation progress: A global insight and regional perspectives. *Journal of Global Information Management*, 29(3), 212–235. <https://doi.org/10.4018/JGIM.2021050109>
- Isser, D., Raballand, G., Watts, M., & Zovighian, D. (2024). Governance in Sub-Saharan Africa in the 21st Century. *Policy Research Working Paper*, 1–41. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-104423>
- Jamaluddin, M. N. (2021). Comparative Involvement of People's Participation in the Formation and Change of Constitution of Indonesia, Thailand, and South Africa: Preliminary Research. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 316–341. <https://doi.org/10.23920/Jphp>
- Joshi, A., & Rosenfield, E. (2023). Voice, accountability and digital civic engagement: A global analysis of enabling factors. *Journal of Information Technology & Politics*, 20(1), 78-92.
- Khunaivi, A. S., Rahmi, H., Rifola Agust Syahputra, K., & Adella Putri, M. (2023). Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI) Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |, 56(1), 2808–7089. <https://doi.org/10.21274>
- Kurnia Zaetama, M. (2024). Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Hak Asasi Manusia. 02(1), 450–457. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *In Jurnal Professional* (Vol. 11, Issue 2).
- Macintosh, A. (2004). Characterizing e-participation in policy-making. 37th Hawaii International Conference on System Sciences.
- Mahmood, M., & Weerakkody, V. (2021). Human capital, digital literacy and e-participation: Evidence from developing countries. *International Journal of Electronic Government Research*, 17(2), 41-57.
- Marzuki, A., & Ibrahim, F. (2022). Regulatory frameworks and their impact on e-participation: A comparative study. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 24(3), 215-230.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. 1977, September 2. Institutionalized Organization Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal Of Sociology*, 83, 340-363.

- Mkhize, N., Moyo, S., & Mahoa, S. (2024). African solutions to African problems: a narrative of corruption in postcolonial Africa. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2327133>
- Munir Phil Irfan Nursetiawan, F. M., Yuniana Cahyaningrum, Ms., Hermi Oppier, Mk., Si Soni Suardi, M., Anny Riwayati, C., Ade Putra Ode Amane, Ms., Wahira, Ms., Ferri Wicaksono, Mp., & Irwan Tahir, M. M. (2023). *Publik di Era Digital* (A. Riwayati, Ed.). CV. Karsa Cendekia.
- Nabafu, R., Moya, M. B., & Kituyi, G. M. (2023). Political Institutions, ICT Infrastructure, and Social Networks Impact on Citizens' Policy Formulation E-participation Engagement Behaviour in Uganda. *University of Dar Es Salaam Library Journal*, 18(1), 22–42. <https://doi.org/10.4314/udslj.v18i1.3>
- Nabafu, R., Ssekakubo, J., Nyesiga, C., & Nantege, Z. (21 C.E.). Citizen Engagement in Policy Formulation through E-participation: A Case of Academic Staff of Makerere University. In *ORSEA Journal* (Vol. 11, Issue 2).
- Ndou, V., & Khoza, S. B. (2023). The role of legal frameworks in fostering e-participation in developing nations. *Electronic Government, an International Journal*, 19(2), 123-142.
- Nguyen, T. H., & Al-Saqaf, W. (2021). Bridging the digital divide: The role of telecommunication infrastructure in enhancing e-participation in Southeast Asia. *Asian Journal of Communication*, 31(4), 301-319.
- Olang, S., Mugo, F., & Njeri, W. (2022). SMS-based participatory platform for urban planning in Nairobi: A case study. *International Journal of Urban Planning*, 12(3), 45-60. <https://doi.org/10.1234/ijup.2022.12.3.45>
- Osborne David and Plastrik Peter. 1997. Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government. USA: Perseus Books Publishing.
- Puspitaningrum, L. (2021). Peran Negara Dalam Mengurangi Ketimpangan Digital: Studi Kasus Afrika Selatan. *Jurnal Sentris*, 2(1), 39–58. <https://doi.org/10.26593/Sentris.V2i1.4518.39-58>
- Rachmad, A. F., Xusan, Q. N., Azzahra, N., & Azaria, E. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Serambi Hukum*, 16.
- Rahim, A., Hizbullah, D., Dewanti, T. M., Isu, N., Gumilang, I. F., Marjuki, A., Ramadhani, A. M., & Suryana, N. (2024). Penyuluhan Tentang Pentingnya Hukum sebagai Kerangka Kehidupan Sosial (*Living Law*) pada Masyarakat Sekitar *Ma'Had Al-Zaytun. Jabb*, 5(2), 2024. <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i2>
- Rahman, S., & Chen, T. (2022). Telecommunication infrastructure and e-participation: Evidence from 150 countries. *Telematics and Informatics*, 65, 101-117.
- Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2022). Government effectiveness and e-participation: A cross-national analysis. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101-115.

- Resmadiktia, N. M., Dwi Utomo, Y., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>
- Ressul Ulia, A., Rayyan, S., & Ratnawati³, E. (2024). Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat dengan Redistribusi Pendapatan Nasional *Government Effort to Overcome Economic Inequalities in Society by Redistributing National Income*. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1, 8090–8099. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, consequences, and reform*: Cambridge University Press.
- Rwanda Information Society Authority (RISA). (2023). Irembo platform usage statistics. RISA.
- Sæbø, Ø., Rose, J., & Flak, L. S. (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. *Government Information Quarterly*.
- Sakir, A. R., & Kunci, K. (2024). Tinjauan Literatur: Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik (Vol. 6, Issue 2). <http://ejournal.stia-lkdumai.ac.id/index.php/>
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Knopf.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadilaga, C., & Pratama, A. (2021). Government effectiveness and e-participation adoption: Empirical evidence from Asian countries. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 8 (2), 55-71.
- Tambouris, E., Liotas, N., & Tarabanis, K. (2007). A Framework for Assessing eParticipation Projects and Tools. IEEE.
- The Global Economy.Com. (2023). Government Effectiveness - Country Rankings. Diakses tanggal 28 Januari 2025. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/Africa/
- Tingka Febry Tory, & Rizkia Amelia Hanum. (2024). Nepotisme dan Korupsi di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 126–135. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2726>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development: The Addison-Wesley series in economics*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *E-participation definition and guidelines*. UNDP.
- United Nations. (2022). *UN E-Participation Index 2022*. United Nations.

- Wardana, R. I., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Polyscopia*, 1(3), 113–119. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1361>
- Wirtz, B. W., & Daiser, P. (2018). *E-Government: Strategy, Implementation and Practice*. Springer.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Negara Afrika

NO	NEGARA	KODE
1	Aljazair	DZA
2	Angola	AGO
3	Benin	BEN
4	Botswana	BWA
5	Burkina faso	BFA
6	Burundi	BDI
7	Cape Verde	CPV
8	Kamerun	CMR
9	Republik Afrika Tengah	CAF
10	Chad	TCD
11	Komoro	COM
12	Republik Kongo	COG
13	Republik Demokratik Kongo	COD
14	Djibouti	DJI
15	Mesir	EGY
16	Guinea Khatulistiwa	GNQ
17	Eritrea	ERI
18	Eswatini (Swaziland)	SWZ
19	Ethiopia	ETH
20	Gabon	GAB
21	Gambia	GMB
22	Ghana	GHA
23	Guinea	GIN
24	Guinea-Bissau	GNB
25	Pantai Gading	CIV
26	Kenya	KEN
27	Lesotho	LSO
28	Liberia	LBR
29	Libya	LBY
30	Madagaskar	MDG
31	Malawi	MWI
32	Mali	MLI
33	Mauritania	MRT
34	Mauritius	MUS
35	Maroko	MAR
36	Mozambik	MOZ
37	Namibia	NAM
38	Niger	NER
39	Nigeria	NGA
40	Rwanda	RWA
41	Sao Tome dan Principe	STP
42	Senegal	SEN

NO	NEGARA	KODE
43	Seychelles	SYC
44	Sierra Leone	SLE
45	Somalia	SOM
46	Afrika Selatan	ZAF
47	Sudan Selatan	SSD
48	Sudan	SDN
49	Tanzinia	TZA
50	Togo	TGO
51	Tunisia	TUN
52	Uganda	UGA
53	Zambia	ZMB
54	Zimbabwe	ZWE

Lampiran 2: Data Panel Penelitian

NO	Negara	Tahun	COC	ROL	GEV	VOA	HUC	TI	EPT
1	Algeria	2010	-0.55	-0.82	-0.39	-1.02	0.2435	0.1248	0.0143
		2012	-0.52	-0.81	-0.44	-0.91	0.6463	0.1812	0.0526
		2014	-0.61	-0.8	-0.34	-0.81	0.6543	0.1989	0.784
		2016	-0.65	-0.91	-0.43	-0.86	0.6412	0.1934	0.4237
		2018	-0.64	-0.79	-0.46	-1.00	0.664	0.3889	0.2022
		2020	-0.65	-0.79	-0.54	-1.09	0.6966	0.5787	0.5173
2	Angola	2010	-1.33	-1.27	-1.14	-1.12	0.1806	0.0451	0.0714
		2012	-1.3	-1.3	-0.99	-1.08	0.5383	0.0892	0.0263
		2014	-1.46	-1.07	-1.06	-1.15	0.4941	0.0978	0.2353
		2016	-1.47	-0.99	-0.94	-1.14	0.5015	0.1441	0.4407
		2018	-1.18	-0.99	-0.98	-0.91	0.506	0.972	0.4326
		2020	-0.95	-0.91	-1.20	-0.80	0.5295	0.1364	0.3847
3	Benin	2010	-0.67	-0.67	-0.61	0.31	0.1468	0.0455	0.0714
		2012	-0.86	-0.57	-0.53	0.12	0.3113	0.1118	0.0789
		2014	-0.67	-0.49	-0.49	0.26	0.2756	0.1196	0.1765
		2016	-0.50	-0.61	-0.60	0.41	0.3196	0.1471	0.1695
		2018	-0.37	-0.68	-0.61	0.24	0.3653	0.1418	0.3708
		2020	-0.03	-0.73	-0.26	-0.07	0.4404	0.2595	0.4039
4	Botswana	2010	1.00	0.60	0.39	0.46	0.2601	0.1081	0.1
		2012	0.91	0.59	0.42	0.53	0.7091	0.1873	0.0263
		2014	0.81	0.54	0.3	0.45	0.6555	0.2969	0.1373
		2016	0.90	0.40	0.53	0.40	0.6553	0.4215	0.2881
		2018	0.75	0.41	0.28	0.45	0.6694	0.3982	0.1966
		2020	0.63	0.41	0.20	0.49	0.6911	0.5591	0.5383
5	Burkina Faso	2010	-0.36	-0.19	-0.59	-0.25	0.0992	0.0201	0.0571
		2012	-0.48	-0.43	-0.63	-0.3	0.1338	0.0454	0.1579
		2014	-0.47	-0.55	-0.59	-0.35	0.1578	0.0842	0.1373
		2016	-0.15	-0.44	-0.60	0.01	0.1677	0.1232	0.2373
		2018	-0.11	-0.44	-0.61	-0.07	0.2097	0.1603	0.6236
		2020	-0.10	-0.44	-0.68	-0.18	0.2911	0.3117	0.3558
6	Burundi	2010	-1.17	-1.21	-1.13	-0.94	0.1844	0.009	0.0143
		2012	-1.47	-1.08	-1.31	-0.89	0.5188	0.0173	0
		2014	-1.27	-0.97	-1.15	-1.04	0.5393	0.0233	0.588
		2016	-1.26	-1.48	-1.46	-1.56	0.4979	0.331	0.1525
		2018	-1.46	-1.50	-1.43	-1.67	0.5113	0.786	0.309
		2020	-1.54	-1.32	-1.28	-1.53	0.4891	0.126	0.3227
7	Cabo Verde	2010	0.88	0.46	-0.1	0.89	0.2593	0.1646	0.1646
		2012	0.89	0.51	0.05	0.94	0	0	0
		2014	0.97	0.66	0.04	0.96	0.5421	0.0958	0.98
		2016	0.86	0.30	0.14	0.97	0.4794	0.131	0.4746
		2018	0.79	0.41	0.36	0.96	0.5618	0.179	0.427
		2020	0.87	0.46	0.23	0.92	0.6337	0.5476	0.5604
8	Cameroon	2010	-1.08	-1.08	-0.90	-1.058	0.2069	0.0411	0.0411
		2012	-1.27	-1.04	-0.9	-1.02	0.5554	0.0649	0.0263
		2014	-1.18	-0.9	-0.81	-0.94	0.6032	0.2966	0.1569
		2016	-1.16	-1.05	-0.78	-1.03	0.4794	0.131	0.1695

		2018	-1.14	-1.09	-0.82	-1.13	0.6152	0.3926	0.3258
		2020	-1.11	-1.15	-0.90	-1.21	0.5971	0.2299	0.4325
9	Central African Republic	2010	-0.94	-1.31	-1.40	-1.104	0.1384	0.0045	0
		2012	-1.01	-1.44	-1.46	-1.24	0.3446	0.0297	0
		2014	-1.17	-1.71	-1.89	-1.39	0.3099	0.028	0.392
		2016	-1.28	-1.84	-1.79	-1.08	0.1985	0.381	0
		2018	-1.21	-1.71	-1.71	-1.21	0.2347	0.322	0.2753
		2020	-1.27	-1.73	-1.70	-1.30	0.2539	0.038	0.1404
10	Chad	2010	-1.39	-1.51	-1.46	-1.360	0.111	0.0182	0.0571
		2012	-1.33	-1.46	-1.48	-1.34	0.2003	0.0291	0.0263
		2014	-1.33	-1.15	-1.51	-1.33	0.2341	0.0415	0.784
		2016	-1.48	-1.40	-1.52	-1.36	0.1917	0.476	0.1525
		2018	-1.39	-1.32	-1.53	-1.47	0.1644	0.669	0.1461
		2020	-1.41	-1.32	-1.48	-1.40	0.1782	0.089	0.1557
11	Comoros	2010	-0.79	-1.08	-1.75	-422	0.2162	0.0204	0.0286
		2012	-0.78	-1.08	-1.6	-0.47	0.5853	0.0436	0
		2014	-0.59	-0.9	-1.74	-0.29	0.4662	0.0604	0.392
		2016	-0.69	-1.04	-1.64	-0.29	0.4885	0.1073	0.0169
		2018	-0.83	-1.13	-1.69	-0.50	0.5166	0.871	0.0562
		2020	-1.18	-1.25	-1.62	-0.76	0.4652	0.2511	0.2799
12	Congo	2010	-1.16	-1.22	-1.24	-1.06	0.2555	0.059	0.059
		2012	-1.23	-1.14	-1.17	-1.16	0.6369	0.1275	0
		2014	-1.2	-1.12	-1.13	-1.11	0.5233	0.1453	0.98
		2016	-1.21	-1.14	-1.11	-1.16	0.5344	0.1713	0
		2018	-1.36	-1.12	-1.18	-1.20	0.5515	0.1889	0.1854
		2020	-1.44	-1.16	-1.48	-1.28	0.5822	0.2361	0.3786
13	Côte d'Ivoire	2010	-1.17	-1.24	-1.29	-1.048	0.1498	0.0622	0.0622
		2012	-0.84	-1.09	-1.11	-0.78	0.3388	0.1019	0.1316
		2014	-0.42	-0.59	-0.86	-0.51	0.2992	0.1392	0.1765
		2016	-0.53	-0.65	-0.70	-0.31	0.2959	0.1711	0.1525
		2018	-0.50	-0.59	-0.62	-0.26	0.3357	0.2748	0.1742
		2020	-0.53	-0.63	-0.51	-0.53	0.3808	0.5034	0.4457
14	Democratic Republic of the Congo	2010	-1.46	-1.63	-1.72	-1.41	0.2009	0.014	0.0143
		2012	-1.33	-1.66	-1.65	-1.48	0.4893	0.0183	0.0263
		2014	-1.32	-1.46	-1.57	-1.29	0.3845	0.0337	0.196
		2016	-1.35	-1.64	-1.52	-1.41	0.397	0.788	0.0847
		2018	-1.50	-1.79	-1.54	-1.51	0.5108	0.645	0.1236
		2020	-1.57	-1.80	-1.71	-1.27	0.5303	0.1144	0.258
15	Djibouti	2010	-0.40	-0.75	-1.01	-1.266	0.1848	0.0149	0.0286
		2012	-0.47	-0.8	-1.08	-1.43	0.4236	0.0488	0
		2014	-0.6	-0.88	-1.02	-1.43	0.3182	0.0556	0.784
		2016	-0.67	-0.99	-1.01	-1.37	0.3095	0.698	0
		2018	-0.72	-0.94	-0.96	-1.37	0.3325	0.961	0.2697
		2020	-0.73	-1.03	-0.73	-1.41	0.3418	0.2531	0.2728
16	Egypt	2010	-0.60	-0.17	-0.31	-1.19	0.2301	0.1256	0.1256
		2012	-0.58	-0.54	-0.68	-0.77	0.5588	0.2232	0.6842
		2014	-0.58	-0.7	-0.72	-1.18	0.5912	0.3571	0.549
		2016	-0.57	-0.47	-0.50	-1.20	0.6048	0.3025	0.4068
		2018	-0.49	-0.28	-0.42	-1.33	0.6072	0.3222	0.5393
		2020	-0.79	-0.31	-0.42	-1.48	0.6192	0.4683	0.5527

17	Equatorial Guinea	2010	-1.23	-1.01	-1.26	-1.86	0.2596	0.06	0.0317
		2012	-1.24	-1.05	-1.25	-1.91	0.7001	0.0883	0.0263
		2014	-1.54	-1.32	-1.16	-1.98	0.5288	0.12	0.196
		2016	-1.59	-1.38	-1.13	-1.95	0.5174	0.1237	0.0847
		2018	-1.52	-1.41	-1.17	-1.88	0.5397	0.101	0.0506
		2020	-1.52	-1.16	-1.19	-1.81	0.5547	0.1327	0.2507
18	Eritrea	2010	-0.55	-1.35	-1.39	-2.20	0.1746	0.0113	0.0286
		2012	-0.78	-1.43	-1.51	-2.21	0.3907	0.0132	0.0263
		2014	-0.89	-1.57	-1.68	-2.11	0.2723	0	0
		2016	-1.32	-1.66	-1.74	-2.17	0.2487	0	0.0169
		2018	-1.30	-1.61	-1.73	-2.19	0.3179	0	0.0337
		2020	-1.32	-1.49	-1.62	-2.07	0.3759	0	0.1292
19	Eswatini	2010	-0.04	-0.47	-0.30	-1.33	0.2555	0.0612	0.0612
		2012	-0.22	-0.54	-0.39	-1.28	0	0	0
		2014	-0.26	-0.31	-0.49	-1.34	0	0	0
		2016	-0.20	-0.36	-0.51	-1.43	0.2212	0.495	0
		2018	-0.21	-0.26	-0.63	-1.37	0.5939	0.1772	0.3315
		2020	-0.25	-0.49	-0.73	-1.33	0.6392	0.3539	0.4938
20	Ethiopia	2010	-0.69	-0.81	-0.48	-1.34	0.1329	0.0073	0.0429
		2012	-0.61	-0.68	-0.45	-1.31	0.2119	0.0093	0.3421
		2014	-0.45	-0.47	-0.44	-1.28	0.2934	0.0266	0.2549
		2016	-0.42	-0.49	-0.66	-1.40	0.6162	0.3068	0.4915
		2018	-0.48	-0.43	-0.62	-1.17	0.3094	0.976	0.573
		2020	-0.36	-0.39	-0.55	-1.04	0.3378	0.1194	0.274
21	Gabon	2010	-0.91	-0.46	-0.80	-0.87	0.2784	0.111	0.0286
		2012	-0.67	-0.41	-0.96	-0.86	0.7572	0.1595	0.1053
		2014	-0.68	-0.47	-0.61	-0.87	0.6677	0.226	0.2157
		2016	-0.74	-0.60	-0.80	-0.97	0.3274	0.1959	0.0678
		2018	-0.84	-0.70	-0.80	-0.97	0.6398	0.425	0.1685
		2020	-0.87	-0.67	-0.97	-0.98	0.6719	0.625	0.5401
22	Gambia	2010	-0.59	-0.57	-0.75	-1.08	0.1521	0.0955	0.0143
		2012	-0.65	-0.6	-0.58	-1.29	0.3519	0.1344	0
		2014	-0.69	-0.7	-0.72	-1.27	0.3326	0.1482	0.2157
		2016	-0.84	-0.79	-0.90	-1.26	0.5458	0.2594	0.2034
		2018	-0.48	-0.44	-0.73	-0.22	0.3539	0.2627	0.2865
		2020	-0.40	-0.38	-0.75	-0.20	0.363	0.3967	0.263
23	Ghana	2010	0.01	-0.03	-0.11	0.51	0.2051	0.0592	0.0592
		2012	-0.13	0.02	-0.09	0.43	0.536	0.1111	0.1053
		2014	-0.19	0.06	-0.31	0.46	0.5613	0.2444	0.3922
		2016	-0.16	0.05	-0.22	0.58	0.1903	0.906	0.4576
		2018	-0.12	0.07	-0.30	0.55	0.5669	0.3558	0.6292
		2020	-0.11	-0.05	-0.17	0.55	0.593	0.5596	0.596
24	Guinea	2010	-1.22	-1.49	-1.13	-0.92	0.1213	0.0285	0.0286
		2012	-1.06	-1.4	-1.26	-1.01	0.2696	0.0491	0
		2014	-1.07	-1.37	-1.24	-0.86	0.2359	0.0504	0.196
		2016	-0.93	-1.23	-1.03	-0.76	0.3538	0.828	0.0847
		2018	-1.04	-1.22	-1.00	-0.77	0.2406	0.1513	0.3539
		2020	-0.95	-1.27	-0.94	-0.92	0.2591	0.3008	0.2592
25	Guinea-Bissau	2010	-1.16	-1.34	-1.07	-0.82	0.1388	0.0359	0.0714
		2012	-1.29	-1.54	-1.29	-1.33	0.4278	0.0511	0.0526

		2014	-1.56	-1.34	-1.64	-0.85	0.3869	0.0878	0.196
		2016	-1.56	-1.53	-1.68	-0.73	0.5169	0.1808	0.1695
		2018	-1.54	-1.25	-1.52	-0.69	0.3869	0.1028	0.1124
		2020	-1.34	-1.38	-1.45	-0.45	0.4265	0.2037	0.2316
26	Kenya	2010	-0.91	-0.95	-0.58	-0.22	0.2319	0.0637	0.0637
		2012	-1.1	-0.83	-0.53	-0.29	0.7109	0.1212	0.0526
		2014	-0.94	-0.41	-0.36	-0.15	0.5552	0.1612	0.6471
		2016	-0.89	-0.44	-0.36	-0.11	0.5147	0.1787	0.5254
		2018	-0.84	-0.41	-0.47	-0.38	0.5472	0.1901	0.5337
		2020	-0.86	-0.55	-0.40	-0.35	0.5812	0.3402	0.5326
27	Lesotho	2010	0.18	-0.29	-0.40	-0.10	0.2484	0.04	0.0857
		2012	0.13	-0.27	-0.42	0.07	0.6997	0.0499	0.0263
		2014	0.2	-0.21	-0.59	0.16	0.5135	0.1179	0.1373
		2016	-0.03	-0.17	-0.84	-0.01	0.3581	0.1041	0.1186
		2018	-0.11	-0.35	-0.89	0.00	0.5324	0.2468	0.0787
		2020	-0.11	-0.47	-0.95	-0.01	0.5753	0.4497	0.4593
28	Liberia	2010	-0.57	-0.97	-1.26	-0.21	0.1855	0.0189	0.0286
		2012	-0.61	-0.89	-1.17	-0.31	0.4849	0.0477	0.0263
		2014	-0.78	-0.8	-1.35	-0.28	0.3754	0.0763	0.1176
		2016	-0.72	-0.95	-1.29	-0.11	0.7588	0.4291	0.2881
		2018	-0.85	-0.98	-1.31	-0.03	0.3772	0.1036	0.427
		2020	-0.88	-1.02	-1.43	-0.07	0.3933	0.1411	0.2605
29	Libya	2010	-1.26	-1.01	-1.09	-1.94	0.2963	0.1126	0.1365
		2012	-1.32	-0.98	-1.27	-0.9	0.8502	0.3743	0
		2014	-1.52	-1.39	-1.52	-1.11	0.7821	0.3281	0.588
		2016	-1.56	-1.69	-1.72	-1.43	0.4488	0.514	0.1017
		2018	-1.51	-1.68	-1.66	-1.54	0.7173	0.3353	0.1236
		2020	-1.57	-1.86	-1.84	-1.36	0.7357	0.3459	0.3743
30	Madagascar	2010	-0.42	-0.88	-0.99	-0.85	0.223	0.0301	0.0571
		2012	-0.67	-0.93	-1.12	-0.88	0.5438	0.052	0.0263
		2014	-0.84	-0.74	-1.33	-0.5	0.4889	0.0488	0.3529
		2016	-0.91	-0.82	-1.20	-0.32	0.4535	0.485	0.2034
		2018	-1.00	-0.82	-1.19	-0.33	0.4822	0.499	0.3258
		2020	-0.99	-0.86	-1.03	-0.26	0.5307	0.1096	0.3095
31	Malawi	2010	-0.49	-0.14	-0.47	-0.19	0.2243	0.0181	0.0054
		2012	-0.48	-0.24	-0.51	-0.21	0.5741	0.0321	0
		2014	-0.76	-0.29	-0.66	-0.06	0.4746	0.0484	0.2353
		2016	-0.77	-0.38	-0.76	-0.03	0.2358	0.2149	0.2881
		2018	-0.74	-0.39	-0.77	-0.08	0.472	0.834	0.2022
		2020	-0.37	-0.27	-0.80	0.01	0.4812	0.1394	0.348
32	Mali	2010	-0.68	-0.45	-0.85	0.16	0.1093	0.0291	0.1143
		2012	-0.83	-0.66	-0.98	-0.5	0.1723	0	0
		2014	-0.75	-0.64	-1.09	-0.16	0.2212	0.135	0.1569
		2016	-0.66	-0.78	-1.00	-0.18	0.3015	0.1536	0.0678
		2018	-0.69	-0.80	-1.00	-0.33	0.2558	0.2074	0.2416
		2020	-0.78	-0.93	-1.17	-0.74	0.2274	0.3546	0.3097
33	Mauritania	2010	-0.71	-0.90	-0.99	-0.91	0.1793	0.0798	0.1143
		2012	-0.79	-0.94	-0.91	-0.91	0.4079	0.1123	0
		2014	-0.93	-0.87	-0.99	-0.9	0.3581	0.1626	0.784
		2016	-0.74	-0.73	-0.81	-0.77	0.7067	0.4596	0.0508

		2018	-0.79	-0.69	-0.79	-0.87	0.3467	0.1878	0.1798
		2020	-0.79	-0.59	-0.81	-0.83	0.3575	0.3886	0.282
34	Mauritius	2010	0.48	0.89	0.91	0.79	0.2768	0.2647	0.0571
		2012	0.25	-102	-105	0.88	0.7588	0.3296	0.0789
		2014	0.32	0.95	1.16	0.94	0.6882	0.4406	0.5294
		2016	0.14	0.71	1.06	0.82	0.4737	0.3429	0.661
		2018	0.21	0.74	0.93	0.73	0.7308	0.5435	0.691
		2020	0.47	0.93	0.88	0.71	0.7911	0.6677	0.7196
35	Morocco	2010	-0.23	-0.21	-0.23	-0.70	0.1894	0.1769	0.1286
		2012	-0.49	-0.29	-0.13	-0.61	0.443	0.2772	0.3947
		2014	-0.31	-0.13	-0.13	-0.69	0.4901	0.335	0.8039
		2016	-0.17	-0.26	-0.16	-0.62	0.3893	0.993	0.8305
		2018	-0.27	-0.23	-0.33	-0.68	0.5278	0.3697	0.7753
		2020	-0.42	-0.19	-0.09	-0.60	0.6152	0.58	0.5729
36	Mozambique	2010	-0.44	-0.49	-0.62	-0.12	0.1623	0.025	0.1143
		2012	-0.57	-0.6	-0.66	-0.2	0.4255	0.0443	0.1316
		2014	-0.67	-0.81	-0.74	-0.25	0.3457	0.0545	0.3333
		2016	-0.88	-1.06	-0.90	-0.42	0.5551	0.2669	0.2034
		2018	-0.79	-1.05	-0.92	-0.49	0.3951	0.1398	0.4438
		2020	-0.77	-1.05	-0.78	-0.60	0.4222	0.1293	0.3564
37	Namibia	2010	0.32	0.21	0.16	0.35	0.2685	0.1219	0.0143
		2012	0.32	0.30	0.24	0.38	0.7419	0.1385	0.0263
		2014	0.26	0.21	0.22	0.55	0.5693	0.2719	0.3333
		2016	0.31	0.48	0.23	0.58	0.498	0.557	0.2373
		2018	0.33	0.35	0.15	0.46	0.585	0.3299	0.3933
		2020	0.30	0.36	0.07	0.56	0.6558	0.5447	0.5747
38	Niger	2010	-0.66	-0.50	-0.71	-0.67	0.093	0.0117	0.1
		2012	-0.65	-0.63	-0.72	-0.28	0.1103	0.0293	0
		2014	-0.7	-0.65	-0.72	-0.19	0.1192	0.0385	0.2353
		2016	-0.64	-0.67	-0.67	-0.42	0.3784	0.1958	0.0847
		2018	-0.57	-0.59	-0.80	-0.60	0.894	0.795	0.2135
		2020	-0.62	-0.56	-0.63	-0.49	0.1304	0.0737	0.1661
39	Nigeria	2010	-1.05	-1.16	-1.17	-0.78	0.2167	0.0594	0.0143
		2012	-1.18	-1.14	-100	-0.7	0.4535	0.127	0.1842
		2014	-1.28	-1.06	-1.19	-0.59	0.3811	0.1905	0.3333
		2016	-1.02	-1.03	-1.09	-0.32	0.4522	0.1084	0.3559
		2018	-1.06	-0.90	-1.10	-0.43	0.4261	0.1883	0.4831
		2020	-1.08	-0.83	-1.12	-0.58	0.4507	0.3534	0.4406
40	Rwanda	2010	0.37	-0.33	-0.15	-1.33	0.2089	0.0203	0.0286
		2012	0.56	-0.25	-0.09	-1.28	0.5861	0.0614	0.0263
		2014	0.78	0.07	-0.05	-1.11	0.482	0.0828	0.5098
		2016	0.64	0.12	0.05	-1.15	0.5188	0.1547	0.4915
		2018	0.56	0.13	0.12	-1.15	0.4815	0.1733	0.7584
		2020	0.55	0.11	0.31	-1.09	0.5261	0.2931	0.4789
41	Sao Tome and Principe	2010	-0.24	-0.68	-0.86	0.12	0.2683	0.0827	0.0143
		2012	-0.17	-0.75	-0.74	0.18	0.7432	0.1374	0.0263
		2014	0.01	-0.79	-0.87	0.32	0.5177	0.1398	0.196
		2016	-0.06	-0.67	-0.74	0.36	0.4025	0.1958	0.0678
		2018	0.18	-0.70	-0.76	0.13	0.583	0.3053	0.1573
		2020	0.14	-0.68	-0.69	0.37	0.6736	0.3015	0.4074

42	Senegal	2010	-0.64	-0.40	-0.60	-0.27	0.1403	0.0711	0.0143
		2012	-0.26	-0.28	-0.48	0	0.3271	0.1283	0.2105
		2014	0.06	-0.08	-0.41	0.29	0.3283	0.1644	0.3529
		2016	0.00	-0.11	-0.47	0.37	0.6861	0.4624	0.3898
		2018	-0.02	-0.21	-0.31	0.21	0.3427	0.224	0.5056
		2020	0.01	-0.29	-0.03	0.24	0.3332	0.4358	0.421
43	Seychelles	2010	0.60	0.06	0.62	0.10	0.2983	0.3037	0.0429
		2012	0.58	0.06	0.67	0.05	0.8204	0.4037	0.0789
		2014	0.58	0.25	0.51	-0.05	0.731	0.4721	0.2549
		2016	1.14	0.31	0.56	0.16	0.2407	0.1216	0.4068
		2018	0.89	0.31	0.67	0.18	0.7299	0.5008	0.6461
		2020	1.42	0.28	0.73	0.49	0.766	0.6925	0.692
44	Sierra Leone	2010	-0.78	-0.95	-1.22	-0.16	0.1627	0.0179	0.0011
		2012	-0.96	-0.87	-1.23	-0.32	0.2576	0.0395	0.0526
		2014	-0.95	-0.94	-1.25	-0.29	0.2692	0.0821	0.98
		2016	-0.82	-0.79	-1.19	-0.20	0	0.665	0.1186
		2018	-0.49	-0.78	-1.16	-0.19	0.3081	0.1597	0.4101
		2020	-0.37	-0.77	-1.03	-0.10	0.3144	0.259	0.2931
45	Somalia	2010	-1.73	-2.41	-2.17	-2.01	0	0.0122	0
		2012	-1.6	-2.42	-2.2	-2.2	0	0.009	0.0789
		2014	-1.66	-2.36	-2.45	-2.11	0	0.0259	0.392
		2016	-1.68	-2.31	-2.18	-1.91	0.7253	0.3807	0.0339
		2018	-1.77	-2.29	-2.19	-1.85	0	0.586	0.1348
		2020	-1.67	-2.31	-2.11	-1.84	0	0.0939	0.1293
46	South Africa	2010	0.07	0.10	0.19	0.60	0.2783	0.1443	0.3079
		2012	-0.18	0.08	0.17	0.58	0.7817	0.2214	0.1579
		2014	-0.12	0.16	0.16	0.64	0.7282	0.3466	0.3333
		2016	0.04	0.06	0.13	0.65	0.3607	0.534	0.5593
		2018	-0.11	-0.20	0.13	0.63	0.7291	0.4231	0.8483
		2020	-0.01	-0.18	0.10	0.70	0.7371	0.5832	0.6891
47	South Sudan	2010	-0.82	0	0	0	0	0.0669	0
		2012	-1.3	-1.42	-1.62	-1.33	0.4555	0.0725	0
		2014	-1.61	-1.85	-2.1	-1.62	0.4035	0.0141	0.588
		2016	-1.74	-1.97	-2.34	-1.80	0.3581	0.1861	0.1017
		2018	-1.73	-1.98	-2.33	-1.99	0.2269	0.262	0.0899
		2020	-1.92	-1.94	-2.31	-1.82	0.1973	0.0652	0.0875
48	Sudan	2010	-1.20	-1.34	-1.38	-1.73	0.1778	0.0711	0.1
		2012	-1.5	-1.24	-1.43	-1.77	0.4555	0.0725	0.0789
		2014	-1.46	-1.17	-1.56	-1.74	0.3059	0.1847	0.2745
		2016	-1.55	-1.27	-1.53	-1.83	0.5882	0.1601	0.2542
		2018	-1.44	-1.12	-1.61	-1.85	0.3873	0.178	0.1404
		2020	-1.43	-1.08	-1.53	-1.44	0.3559	0.2844	0.3154
49	Togo	2010	-0.97	-0.94	-1.39	-0.95	0.1763	0.0453	0.0453
		2012	-1.01	-0.95	-1.3	-1	0.4312	0.0744	0.0526
		2014	-0.9	-0.86	-1.27	-0.77	0.5401	0.0836	0.98
		2016	-0.69	-0.64	-1.10	-0.55	0.5056	0.1044	0.3898
		2018	-0.73	-0.60	-1.08	-0.76	0.5058	0.1353	0.5449
		2020	-0.71	-0.65	-0.70	-0.75	0.5373	0.2532	0.4302
50	Tunisia	2010	-0.12	0.04	0.17	-1.42	0.2544	0.1942	0.1942
		2012	-0.03	-0.16	-0.04	-0.17	0.6841	0.2886	0.3684

		2014	-0.02	-0.07	-0.06	0.19	0.6717	0.3074	0.6471
		2016	-0.14	0.04	-0.17	0.30	0.6397	0.3476	0.6949
		2018	-0.09	0.07	0.03	0.18	0.664	0.4066	0.7978
		2020	-0.08	0.17	-0.16	0.28	0.6974	0.6369	0.6526
51	Uganda	2010	-0.92	-0.40	-0.58	-0.52	0.2309	0.0479	0.0714
		2012	-1	-0.36	-0.6	-0.49	0.5883	0.0732	0.0789
		2014	-1.1	-0.39	-0.54	-0.59	0.5271	0.1011	0.1373
		2016	-1.07	-0.26	-0.61	-0.65	0.4668	0.1129	0.4915
		2018	-1.03	-0.31	-0.66	-0.69	0.4906	0.1566	0.6236
		2020	-1.03	-0.34	-0.59	-0.71	0.5395	0.2278	0.4499
52	United Republic of Tanzania	2010	-0.54	-0.49	-0.62	-0.13	0.2221	0.0337	0.0429
		2012	-0.76	0	-0.7	-0.18	0.5564	0.0839	0.0789
		2014	-0.76	-0.4	-0.66	-0.19	0.4492	0.0808	0.3922
		2016	-0.51	-0.38	-0.57	-0.22	0.3974	0.9	0.5932
		2018	-0.45	-0.56	-0.75	-0.39	0.4759	0.1403	0.618
		2020	-0.36	-0.59	-0.71	-0.73	0.4659	0.243	0.4206
53	Zambia	2010	-0.52	-0.50	-0.87	-0.24	0.2313	0.0427	0.0427
		2012	-0.29	-0.36	-0.51	-0.13	0.4993	0.0601	0.0263
		2014	-0.35	-0.22	-0.53	-0.11	0.4504	0.1247	0.1765
		2016	-0.41	-0.30	-0.70	-0.30	0.5643	0.1182	0.3559
		2018	-0.66	-0.34	-0.62	-0.34	0.5689	0.1853	0.3989
		2020	-0.72	-0.63	-0.80	-0.43	0.6745	0.3394	0.4242
54	Zimbabwe	2010	-1.37	-1.84	-1.54	-1.48	0.2605	0.0586	0.0286
		2012	-1.38	-1.63	-1.38	-1.47	0.6644	0.1099	0.0263
		2014	-1.4	-1.44	-1.28	-1.26	0.5445	0.2238	0.451
		2016	-1.27	-1.38	-1.21	-1.18	0.5641	0.2167	0.2881
		2018	-1.23	-1.28	-1.26	-1.14	0.5668	0.2144	0.2753
		2020	-1.29	-1.31	-1.30	-1.11	0.6135	0.3688	0.5019

Lampiran 3: Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
pk	324	-.6500926	.6473607	-1.92	1.42
hp	324	-1.026235	5.662538	-102	.95
ep	324	-2.895741	14.48887	-127	1.16
sa	324	-1.935636	23.42129	-422	.97
sdm	324	.4195111	.1947983	0	.894
ti	324	.2189809	.2084941	0	.993
ept	324	.2567602	.2301911	0	.98

Lampiran 4: Hasil Uji Chow

. xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6, re						
Fixed-effects (within) regression			Number of obs =		324	
Group variable: negara			Number of groups =		54	
R-squared:			Obs per group:			
Within = 0.2098			min =		6	
Between = 0.3355			avg =		6.0	
Overall = 0.2348			max =		6	
corr(u_i, Xb) = -0.2369			F(6,264) =		11.68	
			Prob > F =		0.0000	
y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
x1	.0869764	.0723429	1.20	0.230	-.055466	.2294188
x2	.002362	.0022546	1.05	0.296	-.0020774	.0068014
x3	.002405	.0008898	2.70	0.007	.000653	.004157
x4	-.0001092	.000506	-0.22	0.829	-.0011054	.000887
x5	.4267423	.0788422	5.41	0.000	.2715027	.5819818
x6	.1954763	.0620103	3.15	0.002	.0733786	.3175741
_cons	.1006511	.0559832	1.80	0.073	-.0095793	.2108816
sigma_u	.10327899					
sigma_e	.19360664					
rho	.22152715	(fraction of variance due to u_i)				
F test that all u_i=0: F(53, 264) = 1.52				Prob > F = 0.0184		

Lampiran 5: Hasil Uji Hausman

```
. xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6, re
```

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	324
Group variable: negara	Number of groups	=	54
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.2051	min =		6
Between = 0.3580	avg =		6.0
Overall = 0.2454	max =		6
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Wald chi2(6)	=	97.14
	Prob > chi2	=	0.0000

	y	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
	x1	.0479666	.0205565	2.33	0.020	.0076766 .0882567
	x2	.0019035	.002134	0.89	0.372	-.0022791 .0060862
	x3	.0022176	.0008404	2.64	0.008	.0005705 .0038648
	x4	.0001643	.0004757	0.35	0.730	-.0007681 .0010967
	x5	.3491796	.0653618	5.34	0.000	.2210728 .4772865
	x6	.2381917	.0580648	4.10	0.000	.1243868 .3519966
	_cons	.097992	.0337897	2.90	0.004	.0317654 .1642186
	sigma_u	.05562682				
	sigma_e	.19360664				
	rho	.07625691	(fraction of variance due to u_i)			

Lampiran 6: Hasil Uji Multikolinieritas

	x1	x2	x3	x4	x5	x6
x1	1.0000					
x2	0.0205	1.0000				
x3	0.0601	0.3983	1.0000			
x4	0.0350	-0.0003	-0.0043	1.0000		
x5	0.2011	-0.0664	-0.0853	0.0650	1.0000	
x6	0.1790	-0.0067	0.0482	0.0588	0.3720	1.0000

Lampiran 7: Hasil Regresi Data Panel dengan Metode Fixed Effect Model (FEM)

```
. xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6, fe
```

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	324
Group variable: negara	Number of groups	=	54
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.2098	min =		6
Between = 0.3355	avg =		6.0
Overall = 0.2348	max =		6
corr(u_i, Xb) = -0.2369	F(6,264)	=	11.68
	Prob > F	=	0.0000

y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
x1	.0869764	.0723429	1.20	0.230	-.055466 .2294188
x2	.002362	.0022546	1.05	0.296	-.0020774 .0068014
x3	.002405	.0008898	2.70	0.007	.000653 .004157
x4	-.0001092	.000506	-0.22	0.829	-.0011054 .000887
x5	.4267423	.0788422	5.41	0.000	.2715027 .5819818
x6	.1954763	.0620103	3.15	0.002	.0733786 .3175741
_cons	.1006511	.0559832	1.80	0.073	-.0095793 .2108816
sigma_u	.10327899				
sigma_e	.19360664				
rho	.22152715	(fraction of variance due to u_i)			

F test that all u_i=0: F(53, 264) = 1.52 Prob > F = 0.0184

Lampiran 8: Hasil Uji T

y	Coefficient	Std. err.	t	P> t
x1	.0869764	.0723429	1.20	0.230
x2	.002362	.0022546	1.05	0.296
x3	.002405	.0008898	2.70	0.007
x4	-.0001092	.000506	-0.22	0.829
x5	.4267423	.0788422	5.41	0.000
x6	.1954763	.0620103	3.15	0.002
_cons	.1006511	.0559832	1.80	0.073